

**STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN
VENTURA PADA PT SARANA JATIM VENTURA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
VICKY ARIVATUS WINDA ACHMADY
NIM: 040710889**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2011

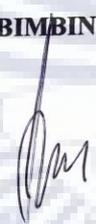
SKRIPSI

**STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN
VENTURA PADA PT SARANA JATIM VENTURA**

**DIAJUKAN OLEH
VICKY ARIVATUS WINDA ACHMADY
NIM : 040710889**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,


Dra. YUSTRIDA B., M.Si., Ak.

TANGGAL..... 20-06-2011.

KETUA PROGRAM STUDI,


Drs. AGUS WIDODO.M., MSi, Ak.

TANGGAL..... 22/6-2011

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Vicky Arivatus Winda Achmady, 040710889), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Mei 2011



Vicky Arivatus Winda Achmady

NIM: 040710889

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan Ventura pada PT Sarana Jatim Ventura”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Airlangga dan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Abah (Alm. H. Achmad Yadi) dan Mama (Hj. Winarsih) yang telah memberikan dukungan moril, materiil, serta semangat hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini dan doa yang teriring di setiap langkah penulis. Juga untuk kedua adik penulis (Venty dan Indra) atas segala dukungan dan hiburan selama ini. Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu :

1. Bapak Prof.Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si., Ak., selaku Ketua Departemen Akuntansi sekaligus Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

3. Dra. Yustrida Bernawati, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu memberikan ilmu dan bimbingan, serta meluangkan banyak waktu dalam terselesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen khususnya jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atas ilmunya yang bermanfaat dan tidak lupa bagian akademik yang telah membuat surat izin untuk melaksanakan penelitian.
5. Mas Yosep, Pak Yopi, Pak Alim, Bu Aisyah, Bu Nur, Bu Indira Sari, Bu Aan, Pak Tri dan seluruh karyawan PT Sarana Jatim Ventura yang membantu kelancaran penelitian yang dilakukan penulis di PT Sarana Jatim Ventura.
6. Didit Dwi Fauzi yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan serta selalu sabar dan ikhlas mendengarkan segala curahan hati penulis dan berjuang bersama dalam suka dan duka.
7. Keluarga besar penulis di Surabaya (Pipit, Mbak Eka, Arma, Irma, Ull, Kamel, Uko, Heppy, dan Mbak lina) yang rela dan setia mendengarkan segala curahan hati penulis dan senantiasa menghibur penulis dengan segala kelucuan tingkah laku mereka yang tiada henti setiap waktu.
8. Sahabat-sahabat *bee* (Maya, Jay, Ayu, Im, Ana, Mey, Ratih, dan Lisa) yang selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dan berjuang bersama dalam suka dan duka.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 20 Mei 2011



Penulis

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang pasti dihadapi oleh suatu lembaga keuangan yang melakukan aktivitas pembiayaan. Risiko pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan pelunasan pembiayaan tidak optimal dan hal tersebut akan berdampak buruk bagi lembaga keuangan. Struktur pengendalian internal yang memadai diperlukan lembaga keuangan untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

PT Sarana Jatim Ventura adalah perusahaan modal ventura daerah yang berada di Jawa Timur. Aktivitas utama dari PT Sarana Jatim Ventura saat ini adalah pembiayaan bagi hasil yang mekanismenya mirip dengan kredit pada umumnya. Pembiayaan bagi hasil diberikan sebagian besar kepada UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh PT Sarana Jatim Ventura semakin besar karena sebagian besar UKM tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan perusahaan yang ada, sehingga sulit untuk menentukan kondisi UKM.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura?” dan “Apakah penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura telah memadai sehingga pelunasan pembiayaan ventura dapat optimal?”. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal pembiayaan ventura PT Sarana Jatim Ventura cukup memadai. Berdasarkan hasil analisis struktur pengendalian internal PT Sarana Jatim Ventura, diketahui bahwa dari 27 kriteria struktur pengendalian internal yang ada hanya tiga kriteria yang tidak terpenuhi. Tiga kriteria tersebut terdiri dari satu kriteria pada komponen penaksiran risiko, satu kriteria pada komponen aktivitas pengendalian, dan satu kriteria pada komponen pengawasan. Struktur pengendalian internal PT Sarana Jatim Ventura yang cukup memadai telah mampu menekan nilai NPF (*Non Performing Finance*), terbukti dengan terjadinya penurunan nilai NPF di mana pada Januari 2011 sebesar 6,58% dan April 2011 sebesar 5,09%. Namun hal tersebut belum mencapai target nilai NPF maksimal perusahaan.

Kata kunci: komponen struktur pengendalian internal, aktivitas pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah.

ABSTRACT

Nonperforming financing is a risk that must be faced by a financial institution financing activity. Risk of non-performing finance will result in repayment of financing is not optimal and it would be bad for financial institutions. Adequate internal control structure is required by financial institutions to prevent the risk of bad debts.

PT Sarana Jatim Ventura is a regional venture capital enterprise in East Java. The main activity of PT Sarana Jatim Ventura is the profit loss sharing financing that has similar mechanism with credit in general. Profit loss sharing financing is given mostly to SMEs (Small and Medium Enterprises). Non-performing financing that borned by PT Sarana Jatim Ventura is greater because most SMEs do not make financial statements in accordance with the company's financial reporting standards, so that difficult to determine the condition of SME.

This research has the formulation of issues to be discussed is "How is the application of the internal control structure of venture financing at PT Sarana Jatim Ventura?" and "Does the implementation of the internal control structure of venture financing at PT Sarana Jatim Ventura has been adequate so that the repayment of financing can be optimal?". While research approach used is qualitative, case study research strategy.

The results showed that the PT Sarana Jatim Ventura's internal control structure of financing is sufficient. Based on the results of analysis of the internal control structure of PT Sarana Jatim Ventura, it is known that from 27 criteria of the internal control structure that is only three criteria are not met. Three criteria are composed of one criteria in risk assessment component, one criteria in control activities component, and one criteria in monitoring component. Adequate internal control structure of PT Sarana Jatim Ventura has been able to suppress the value of NPF (Non Performing Finance), proven by the decreasing value of NPF where in January 2011 at 6.58% and April 2011 at 5.09%. But it has not reached the target value of maximum NPF company.

Keywords: components of the internal control structure, financing activities, the level of nonperforming finance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Skripsi	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Struktur Pengendalian Internal	8
2.1.1.1. Pengertian Struktur Pengendalian Internal	8
2.1.1.2. Komponen Struktur Pengendalian Internal	9

2.1.1.3. Fungsi Pengendalian Internal	19
2.1.1.4. Keterbatasan Pengendalian Internal	19
2.1.1.5. Pengendalian Internal Perkreditan	21
2.1.2. Modal Ventura	22
2.1.2.1. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura ..	22
2.1.2.2. Jenis Pembiayaan	24
2.1.2.3. Kolektibilitas Pembiayaan	26
2.1.2.4. Prinsip Pembiayaan.....	27
2.1.2.5. Tahap-tahap Pembiayaan Modal Ventura.....	28
2.1.2.6. Optimalisasi Pembiayaan	30
2.1.2.6.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	30
2.1.2.6.2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	31
2.1.2.6.3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	32
2.2. Penelitian Sebelumnya	34
2.3. Kerangka Berpikir.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1. Pendekatan Penelitian	36
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data	37
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	38
3.5. Teknik Analisis	40
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian	43

4.1.1. Sejarah Perusahaan	43
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi.	45
4.1.4 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Masing-Masing Fungsi.....	46
4.1.5. Produk Pembiayaan	52
4.1.6. Tahap Pembiayaan	53
4.2. Pembahasan.....	64
4.2.1. Struktur Pengendalian Internal	78
4.2.1.1. Lingkungan Pengendalian	78
4.2.1.2. Penaksiran Risiko	81
4.2.1.3. Aktivitas Pengendalian	83
4.2.1.4. Informasi dan Komunikasi	86
4.2.1.5. Pemantauan	88
4.2.2. <i>Non Performing Finance</i>	89
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Simpulan	92
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Kriteria Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan yang Memadai .	41
Tabel 4.1.	Analisis Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	65
Tabel 4.2.	Ringkasan Analisis Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	77
Tabel 4.3.	Tingkat Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Finance</i>) PT Sarana Jatim Ventura Januari 2011-April 2011	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil wawancara
- Lampiran 2 *Form Basic Information Report*
- Lampiran 3 *Form Analisis*
- Lampiran 4 *Form Committee Approval*
- Lampiran 5 *Form Proposal Investasi*
- Lampiran 6 *Form Analisis Yuridis (Badan Hukum)*
- Lampiran 7 *Form Nota Penurunan Pembiayaan*
- Lampiran 8 *Form Permohonan Pencairan Dana Perusahaan Pasangan Usaha*
- Lampiran 9 *Form Call Report*
- Lampiran 10 Bobot Penilaian dan Kriteria (Nilai) Kesehatan PPU

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Hanya perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dapat bertahan dalam persaingan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit. Banyak perusahaan yang kesulitan bahkan tidak mampu bertahan dalam persaingan karena terkendala oleh modal/dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Hal tersebut juga dialami oleh UKM seperti yang dijelaskan dalam Kiat Usaha (<http://programukm.blogspot.com>), bahwa salah satu penyebab utama kegagalan dalam bisnis adalah modal yang tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan suntikan dana dari pihak ketiga untuk mengatasinya. Di sini lembaga keuangan hadir menjadi alternatif bagi perusahaan dan UKM untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perusahaan modal ventura. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 pasal 1 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan,

“Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”.

Pembiayaan yang dilakukan PMV terhadap UKM akan berguna bagi pengembangan usaha UKM.

Sebagian besar aktivitas PMV saat ini adalah pembiayaan bagi hasil yang mekanismenya sama dengan pemberian kredit oleh bank. Kredit memiliki risiko bisnis yang cukup besar, salah satunya yaitu timbulnya kredit bermasalah. Seperti halnya kredit, pada pembiayaan juga terdapat risiko pembiayaan bermasalah salah satunya adalah pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah tidak terlunasinya pembiayaan yang diberikan dan hal tersebut mengindikasikan pelunasan pembiayaan tidak optimal. Pembiayaan bermasalah menjadi risiko yang cukup besar bagi PMV karena sasaran utama PMV adalah UKM, di mana terkadang masih banyak UKM yang tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan perusahaan yang ada. Mereka cenderung hanya membuat catatan keuangan yang sederhana sehingga mempersulit PMV dalam menilai kondisi UKM.

Struktur pengendalian internal pembiayaan sangat diperlukan oleh lembaga keuangan termasuk PMV. Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi struktur pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2003:195) adalah *“preventive controls deter problems before they arise”*. Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa struktur pengendalian internal pemberian pembiayaan dapat mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah sehingga pelunasan pembiayaan dapat optimal.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan macet baik faktor eksternal maupun internal lembaga keuangan. Beberapa faktor internal yang dapat

menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah tentunya tidak jauh berbeda dengan penyebab kredit bermasalah seperti adanya kolusi antara pejabat bank (lembaga keuangan) yang menangani pembiayaan dan nasabah (pihak yang dibiayai), keterbatasan pengetahuan pejabat bank (lembaga keuangan) terhadap jenis usaha debitur (pihak yang dibiayai), dan analisis yang kurang tepat (Ismail, 2010:123). Pembiayaan macet dapat disebabkan oleh faktor internal seperti halnya kredit macet yang terjadi pada bank mandiri dimana “kredit macet di Bank Mandiri banyak terjadi lantaran kebijakan para manajemen bank yang 'memaksa' membeli aset-aset busuk di BPPN yang tidak lagi laku dijual. Mungkin sekali, kongkalikong terjadi antara pengelola perusahaan, pengelola BPPN, dan pengelola Bank Mandiri” (<http://els.bappenas.go.id>). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan lemahnya struktur pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas struktur pengendalian internal pembiayaan untuk mengetahui kelemahan struktur pengendalian internal dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya yang disebabkan oleh faktor internal lembaga keuangan.

Lemahnya struktur pengendalian internal pembiayaan merupakan masalah yang serius karena kemungkinan dapat membuat lembaga keuangan bangkrut. Hal tersebut terjadi pada BPR Tripanca Setiadana, dimana dalam Darussman *Official Blog* (<http://darrusman.blogspot.com>) dijelaskan bahwa pada tanggal 12 desember 2008 Bank Indonesia melaporkan BPR Tripanca Setiadana karena kasus dana macet di bank tersebut dinilai termasuk tindak pidana perbankan dan BPR Tripanca Setiadana dinyatakan pailit oleh BI pada tanggal 24 Maret 2009. Kasus

tersebut terbukti dengan terungkapnya kredit fiktif senilai Rp 735,455 miliar yang diajukan oleh komisaris utama BPR Tripanca Setiadana (<http://infokorupsi.com>). Adanya kasus kredit fiktif tersebut sedikit maupun banyak memiliki kontribusi dalam bangkrutnya BPR Tripanca Setiadana.

PT Sarana Jatim Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura Daerah yang berada di Jawa Timur. PT Sarana Jatim Ventura telah melakukan analisis kelayakan kepada calon PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) yang mengajukan permohonan pembiayaan sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan serta melakukan pengawasan atas kinerja PPU setelah pembiayaan diberikan kepada PPU, namun hal tersebut tidak membuat PT Sarana Jatim Ventura bebas dari risiko pembiayaan bermasalah seperti yang diungkapkan pada laporan kondisi kesehatan PPU PT Sarana Jatim Ventura di mana tingkat NPF atau pembiayaan bermasalah di PT Sarana Jatim Ventura untuk Januari 2011-April 2011 rata-rata di atas 5%. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai struktur pengendalian internal pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Jatim Ventura. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengambil judul **“Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan Ventura pada PT Sarana Jatim Ventura”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura ?

2. Apakah penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura telah memadai sehingga pelunasan pembiayaan ventura dapat optimal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura telah memadai sehingga pelunasan pembiayaan ventura dapat optimal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Membantu pihak manajemen PT Sarana Jatim Ventura mengidentifikasi kelemahan pada struktur pengendalian internal pembiayaan ventura yang diterapkan saat ini.
2. Memberikan alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi PT Sarana Jatim Ventura terkait dengan penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura.
3. Menambah informasi dan wawasan mengenai struktur pengendalian internal pembiayaan yang sebelumnya telah diperoleh di bangku kuliah.
4. Skripsi ini dapat menjadi acuan dan studi pembandingan serta dapat memberikan informasi bagi pihak lain yang melakukan penelitian pada topik yang sama.

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pembahasannya, penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi mengenai struktur pengendalian internal. Dalam latar belakang masalah diuraikan landasan pemikiran secara garis besar yang menimbulkan minat dalam melakukan penelitian, dalam hal ini adalah terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Sarana Jatim Ventura yang kemungkinan disebabkan dari faktor internal sehingga perlu dilakukan evaluasi atas struktur pengendalian internal pembiayaan yang diterapkan PT Sarana Jatim Ventura.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal, komponen struktur pengendalian internal, prosedur pengendalian internal pembiayaan, tahap pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang dirumuskan serta berisi penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Penelitian ini terbatas pada struktur pengendalian internal pembiayaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang

digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data berupa survei pendahuluan, studi literatur, dan studi lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi PT Sarana Jatim Ventura, prosedur pembiayaan, laporan *Non Performing Finance* serta pembahasan atas rumusan masalah berdasarkan data yang ada dan teori yang telah dikemukakan di atas.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan yang terdapat di pembahasan masalah dan memberikan saran-saran yang diperlukan oleh PT Sarana Jatim Ventura untuk meningkatkan struktur pengendalian internal perusahaan dalam hal pembiayaan yang mereka lakukan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Struktur Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi karena memiliki beberapa fungsi terkait penanganan suatu masalah yang dihadapi organisasi. Menurut Romney dan Steinbart (2003:195), fungsi tersebut meliputi “*preventive control, detective control, corrective control*”. Berikut dijelaskan beberapa hal mengenai struktur pengendalian internal.

2.1.1.1. Pengertian Struktur Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2003:195), “*the internal control structure consists of the policies and procedures established to provide a reasonable level of assurance that the organization’s specific objectives will be achieved*” yang dapat diterjemahkan sebagai berikut, struktur pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibentuk untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa tujuan spesifik organisasi akan tercapai. Sedangkan menurut Moeller (2009:24) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal controls are processes, implemented by management, that are designed to provide reasonable assurance for:

- a. Reliable financial and operational information*
- b. Compliance with policies and procedures plans, laws, rules, and regulations*
- c. Safeguarding of assets*
- d. Operational efficiency*

- e. Achievement of an established mission, objectives and goals for enterprise operations and programs*
- f. Integrity and ethical values”*

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, dan struktur pengendalian internal dapat dikatakan memadai apabila :

1. Menghasilkan data yang dapat diandalkan/dipercaya baik berupa informasi keuangan dan operasional
2. Menjalankan misi organisasi yang telah ditetapkan dengan etika yang baik serta patuh terhadap kebijakan, regulasi, dan peraturan yang berlaku
3. Menyediakan pengamanan yang tepat untuk aset/kekayaan organisasi
4. Menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien dalam menjalankan segala operasional organisasi

Pengawasan atas penerapan struktur pengendalian internal perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana misi dan tujuan organisasi tercapai. Evaluasi atas penerapan struktur pengendalian internal juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan atas struktur pengendalian internal yang telah dirancang dan diterapkan di organisasi.

2.1.1.2. Komponen Struktur Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal suatu organisasi terdiri dari lima komponen pokok yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian dijelaskan oleh Boynton dan Johnson (2006:397) sebagai berikut, *“The control environment represent the tone set by management of an organization that influences the control consciousness of its people”*. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan pengendalian menggambarkan suasana yang ditetapkan manajemen yang mampu mempengaruhi kesadaran setiap anggota organisasi terhadap pengendalian.

Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini :

a. Nilai integritas dan etika

Memadai atau tidak suatu struktur pengendalian internal sangat bergantung dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakan struktur pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu, orang yang mendesain dan melaksanakan struktur pengendalian internal harus memiliki etika dan menjunjung tinggi integritas. Menurut Boynton dan Johnson (2006:397), dalam rangka menegaskan pentingnya nilai etika dan integritas maka CEO dan anggota manajemen puncak yang lain harus melakukan berikut ini :

1. *Set the tone by example by consistently demonstrating integrity and practicing high standards of ethical behavior*
2. *Communicate to all employees, verbally through written policy statements and code conduct, that the same expected of them, that each employee has a responsibility to report known or suspected violations to a higher level in the organizations, and that violations will result in penalties*
3. *Provide moral guidance to eny employees whose poor moral backgrounds have made them ignorant of what is right and wrong*
4. *Reduce or eliminate incentives and temptation that might lead individuals to engage in dishonest, illegal, or unethical acts”*

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menetapkan suasana perusahaan dengan menunjukkan integritas dan mempraktekan standar yang tinggi atas perilaku etika
 2. Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan tertulis dan kode etika perusahaan
 3. Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki moral yang kurang baik
 4. Mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat membuat seseorang berperilaku tidak jujur
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- Tujuan organisasi dapat tercapai apabila masing-masing personel organisasi mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Manajemen harus memastikan bahwa seluruh personel di setiap tingkat organisasi memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan serta sesuai dengan tugas/fungsi masing-masing.
- c. Dewan komisaris dan komite audit
- Dewan komisaris dan komite audit harus independen dari manajemen organisasi agar fungsi dewan komisaris dan komite audit dapat berjalan dengan efektif yaitu mengawasi struktur pengendalian internal organisasi, pelaporan keuangan organisasi, dan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Independen disini berarti anggota dewan komisaris dan komite audit harus berasal dari pihak di luar manajemen.

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi

Tidak ada satupun gaya operasi dan filosofi yang terbaik bagi semua perusahaan, namun dua hal tersebut penting ketika mempertimbangkan komponen struktur pengendalian internal yang lain. Ada beberapa karakteristik yang membentuk filosofi manajemen dan gaya operasi yang berdampak pada lingkungan pengendalian. Menurut Boynton dan Johnson (2006:398) karakteristik tersebut meliputi :

- “ 1. *Approach to taking and monitoring business risk.*
2. *Reliance on informal face-to-face contacts with key managers versus a formal system of written policies, performance indicators, and exception reports.*
3. *Attitudes and actions toward financial reporting.*
4. *Conservative or aggressive selection from available accounting principles.*
5. *Conscientiousness and conservatism in developing accounting estimates.*
6. *Conscientiousness and understanding of the risks associated with TI ”*

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya, karena struktur organisasi menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas organisasi.

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Wewenang harus dibagikan dengan jelas untuk mempermudah pengalokasian berbagai sumber daya dan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi harus dilakukan secara formal atau tertulis, di mana hal tersebut mengindikasikan pengendalian yang kuat.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pihak yang menjalankan struktur pengendalian internal yang menentukan kualitas dari struktur pengendalian internal. Manajemen dan seluruh karyawan organisasi merupakan pelaksana struktur pengendalian internal. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia dapat memastikan bahwa karyawan perusahaan memiliki kompetensi, tingkat integritas, dan nilai etika yang diharapkan organisasi. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia meliputi kebijakan perekrutan, pelatihan, pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi karyawan.

2. Penaksiran risiko

Menurut Boynton dan Johnson (2006:402), *“Risk assessment for financial reporting purposes is an entity’s identification, analysis, and management of risk relevant to the preparation of financial statements that are fairly presented in conformity with generally accepted accounting principles”*. Tahapan yang paling penting dalam penaksiran risiko adalah dalam mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal. Dalam memperkirakan suatu risiko yang berhubungan dengan proses pelaporan keuangan, harus dipertimbangkan beberapa hal seperti perubahan dalam lingkungan operasi organisasi, personel/karyawan baru, sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, pertumbuhan yang cepat, implementasi teknologi baru, lini, produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi organisasi, operasi di luar negeri, atau peraturan akuntansi yang baru.

Boynton dan Johnson (2006:402) berpendapat *“In a strong risk assessment system, management should consider the entity’s business risk and their financial consequences, the inherent risks of misstatement in financial statement assertions, and the risk of fraud and its financial consequences ”*. COSO dalam Moeller (2009:39) mendeskripsikan bahwa ada tiga langkah dalam proses penaksiran risiko yaitu *“Estimates the significance of the risk, assess the likelihood or frequency of the risk occurring, consider how the risk should be managed, and assess what action must be taken ”*.

3. Aktivitas pengendalian

Menurut Boynton dan Johnsons (2006:405), *“Control activities are those policies and procedures that help ensure that management directives are carried out”*. Sedangkan menurut Moeller (2009:41), *“Control activities are the policies and procedures that help ensure that actions identified to address risks carried out, following a wide range of controls activities sub-processes”*. Dari kedua keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen dan tindakan yang diidentifikasi untuk menangani risiko telah dilaksanakan.

Menurut Boynton dan Johnsons (2006:405), aktivitas pengendalian dikategorikan menjadi enam bagian yaitu :

a. Pengendalian otorisasi

Tujuan utama prosedur otorisasi yang tepat adalah untuk memastikan setiap transaksi telah diotorisasi oleh personel manajemen dalam lingkup kekuasaannya.

b. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas yang kuat mencakup pemisahan tugas antara individu yang melakukan otorisasi transaksi, pemeliharaan atas penjagaan asset perusahaan dan pemeliharaan atas catatan akuntansi.

c. Pengendalian pemrosesan informasi

Pengendalian pemrosesan informasi dilakukan untuk mencegah risiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan keakuratan transaksi.

Pengendalian pemrosesan informasi dibedakan menjadi :

1) Pengendalian umum

Tujuan pengendalian umum adalah untuk mengendalikan pengembangan program, perubahan program, operasi komputer, dan untuk mengamankan akses terhadap data dan program. Contoh pengendalian umum antara lain pemisahan tugas antara departemen teknologi informasi dan pemakai teknologi informasi, peninjauan, pengujian, dan persetujuan sistem baru dan perubahan program, serta pengendalian atas akses ke program komputer, data (*file*), dan peralatan teknologi informasi.

2) Pengendalian aplikasi komputer

Pengendalian aplikasi komputer meliputi pengendalian input, proses, dan output.

3) Pengendalian atas proses pelaporan keuangan

d. Pengendalian fisik.

Pengendalian fisik menyangkut pembatasan atas akses terhadap aset dan catatan-catatan yang penting baik akses fisik secara langsung maupun akses tidak langsung atas pembuatan dan pemrosesan dokumen.

e. Peninjauan kinerja

Contoh peninjauan kinerja adalah laporan yang merangkum rincian saldo akun dan kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, peramalan, atau jumlah periode sebelumnya, meninjau hubungan antara data keuangan dan data nonkeuangan seperti data statistik jumlah tamu yang menginap di suatu hotel dengan laporan pendapatan.

f. Pengawasan lebih atas kebijakan dalam *financial reporting*

The PCAOB in Auditing Standard No.2 yang dikutip Boynton dan Johnsons (2006:412), suatu *public company* diharapkan membangun pengendalian internal dalam tiga area berikut :

- 1) Pengawasan lebih atas transaksi yang tidak rutin yang signifikan
- 2) Pengawasan lebih atas pemilihan dan penggunaan GAAP
- 3) Pengawasan lebih dalam pengungkapan

Selain itu menurut Bodnar dan William (2006:143), dalam aktivitas pengendalian perlu dilakukan pengecekan akuntabilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independen. Akuntabilitas pencatatan aktiva/harta kekayaan perusahaan seharusnya dibandingkan dengan aktiva yang ada untuk menjamin tidak ada

pencatatan aktiva fiktif perusahaan. Adanya pihak independen diperlukan untuk melakukan pengecekan tersebut agar pengecekan tersebut efektif.

Hall (2007:193) menyebutkan dalam aktivitas pengendalian juga perlu adanya supervisi dan verifikasi independen. Supervisi atau pengawasan perlu dilakukan oleh pihak manajemen untuk memastikan pekerjaan para karyawan berjalan dengan baik. Supervisi perlu dilakukan terutama oleh perusahaan kecil yang memiliki personil yang tidak cukup banyak sehingga terjadi masalah pemisahan tugas yang kurang memadai.

Menurut Hall (2007:194), "Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen sistem akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan kesalahan penyajian". Contoh verifikasi independen antara lain :

1. Membandingkan aktiva fisik dengan catatan akuntansi
2. Rekonsiliasi total *batch* pada titik-titik tertentu selama pemrosesan transaksi
3. Rekonsiliasi berbagai akun buku pembantu dengan akun pengendalinya
4. Mengkaji laporan manajemen, baik yang dihasilkan komputer maupun manual, yang meringkas berbagai aktivitas bisnis
4. Informasi dan komunikasi

Suatu informasi dalam suatu organisasi harus mengalir baik dari tingkat atas ke tingkat yang lebih rendah maupun sebaliknya dengan cara dan waktu yang tepat sehingga anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sistem informasi menghasilkan laporan kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan usaha perusahaan. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya berasal dari internal namun

juga eksternal. Moeller (2009:43) berpendapat bahwa *“The effective enterprise should have information systems in place to listen to customer requests or complaints and to forward customer-initiated information to appropriate personnel”*.

Komunikasi berhubungan dengan pemberian pemahaman kepada masing-masing individu dalam suatu organisasi mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan struktur pengendalian internal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Perusahaan harus memiliki prosedur yang efektif untuk berkomunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Seluruh anggota organisasi harus memahami tugas dan tindakannya masing-masing terkait dengan pengendalian internal. Mereka harus memiliki alat yang menyebarluaskan informasi penting.

5. Pengawasan

Pengawasan dijelaskan oleh Boynton dan Johnson (2006:413) sebagai berikut, *“Monitoring is a process that assesses the quality of internal control performance over time. It involves assessing the design and operation of controls on a timely basis and taking necessary corrective actions”* yang dapat diterjemahkan sebagai berikut, pengawasan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal, pengawasan terdiri dari penilaian desain dan operasional pengendalian dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Fungsi audit internal yang biasanya melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengendalian internal secara terus-menerus dalam suatu organisasi.

2.1.1.3. Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2003:195) yaitu :

1. *Preventive controls deter problems before they arise*
2. *Detective controls are needed to discover problems as soon as they arise*
3. *Corrective controls remedy problems discovered with detective control*

yang dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*), mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul
2. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*), dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul
3. Pengendalian korektif (*corrective control*), memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan

2.1.1.4. Keterbatasan Pengendalian Internal

Boynton dan Johnson (2006:393) berpendapat "*Internal control can provide only reasonable assurance to management and the board of directors regarding the achievement of an entity's objectives*". Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pengendalian internal hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan mutlak, hal tersebut dikarenakan pengendalian internal memiliki keterbatasan bawaan (*inherent limitations*). Menurut Boynton dan Johnson (2006:393), keterbatasan pengendalian internal meliputi *mistakes in judgement, breakdowns, collusion, management override, and cost versus benefits*. Keterangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan (*mistakes in judgement*)

Manajemen dan personel perusahaan yang lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi dan keterbatasan waktu.

2. Gangguan (*breakdowns*)

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel perusahaan salah dalam memahami perintah, perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur.

3. Kolusi (*collusion*)

Kolusi merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan seperti tindakan karyawan perusahaan yang melaksanakan fungsi pengendalian yang penting dengan karyawan lain, pelanggan, pemasok sehingga tindakan kecurangan tersebut tidak dapat terdeteksi.

4. Pengabaian oleh manajemen (*management override*)

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer. Contohnya manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi.

5. Biaya lawan manfaat (*cost versus benefits*)

Biaya pengendalian internal perusahaan tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Pengukuran biaya dan manfaat secara tepat tidak mungkin dilakukan, manajemen harus mempertimbangkan

secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian internal.

2.1.1.5. Pengendalian Internal Perkreditan

Menurut Tawaf (1999:270), aspek pengendalian internal perkreditan adalah sebagai berikut :

1. Adanya sistem pengendalian internal yang baik yaitu harus ada pemisahan tugas/fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan atas kredit yang diberikan, analisis kredit, administrasi kredit, dan transaksi agunan.
2. Adanya kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui oleh dewan direksi. Kebijakan tertulis tersebut paling tidak harus memuat beberapa ketentuan atas berbagai hal seperti mengenai limit cabang dan pemberi persetujuan, jenis kredit yang dilarang, maksimum dan minimum jangka waktu kredit, tingkat bunga dan provisi, perbandingan antara jaminan dengan kredit yang diberikan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi kredit, serta pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.
3. Petugas yang memproses kredit adalah petugas yang kompeten. Maksudnya para petugas atau pengelola kredit harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai kredit dan penanganan atas permasalahan kredit.
4. Adanya fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan pelaksanaan kegiatan tersebut harus selalu dipantau oleh manajemen.

2.1.2. Modal Ventura

Menurut Umam (2010:32) “ Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko”. Definisi modal ventura juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 pasal satu yaitu,

“Modal ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi konversi kepada KUKM-PPU dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha KUKM-PPU, investasi bersifat sementara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan”.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa modal ventura adalah salah satu bentuk pembiayaan kepada suatu Usaha Kecil Menengah (UKM) atau perusahaan yang memiliki tingkat resiko dan dalam jangka waktu tertentu melalui penyertaan saham, obligasi konversi, atau bagi hasil. Berbeda dengan pembiayaan lainnya seperti pinjaman dari bank ,dengan modal ventura keterlibatan langsung dalam aktivitas perusahaan atau UKM yang dibiayai juga dilakukan apabila hal tersebut dianggap perlu.

2.1.2.1. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura antara lain:

1. Perusahaan Modal Ventura (PMV)

PMV merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana (Umam, 2010:35). Sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 pasal satu tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan,

“Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”.

Dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah perusahaan yang melakukan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana melalui penyertaan saham, obligasi konversi, atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan praktek operasionalnya PMV menjalankan dua fungsi (Umam, 2010:35), yaitu :

- a. Sebagai *investee management*, apabila dana pinjaman yang diberikan PMV kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berasal dari modal PMV sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk operasional PMV
- b. Sebagai *fund management*, apabila PMV hanya berfungsi sebagai penyanggah dana pihak ketiga dan berada pada fungsi penghubung (*channelling*) atas dana yang diberikan tersebut kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

2. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan pasal satu, “Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Ventura”. PPU sebagai mitra usaha PMV harus memenuhi persyaratan berikut (Umam, 2010:37):

- a. PPU mempunyai pangsa pasar yang prospektif
- b. Pemiliknya menguasai bidang usahanya

- c. PPU mempunyai *return on investment* yang baik
- d. Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru

3. Pihak Penyandang Dana

Pihak penyandang dana adalah pihak yang terlibat dalam fungsi PMV sebagai *fund management* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Dahlan Siamat dalam Umam (2010:37) sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain :

- a. Investor Perorangan
- b. Perusahaan
- c. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

4. Akuntan Publik

Menurut Umam (2010:38) sebenarnya akuntan publik bukan termasuk pihak dalam sistem pembiayaan modal ventura namun PMV seringkali melibatkan jasa akuntan publik untuk mereview kondisi keuangan calon PPU.

2.1.2.2. Jenis Pembiayaan

Cara pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura (PMV) terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) menurut Siamat (2004:342) antara lain :

1. Penyertaan Modal Langsung

Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura (PMV) pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil

bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha (PPU) yang bersangkutan.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Siamat (2004:343) pembiayaan bagi hasil menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Hal tersebut berarti pembiayaan bagi hasil tidak menetapkan jumlah secara pasti yang harus dibayar oleh debitur karena bagi hasil sangat bergantung pada keuntungan yang diperoleh debitur dan tentunya jumlah keuntungan yang diperoleh debitur setiap bulan tidak sama. Ibid dalam Umam (2010:13) menjelaskan “pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil dibukukan dalam pos pinjaman oleh perusahaan penerima dana”. Produk pembiayaan secara bagi hasil menurut Umam (2010:14) terdiri dari tiga macam pola, yaitu sebagai berikut :

a. Pola Pembiayaan Bagi Hasil Umum

Pola pembiayaan bagi hasil umum adalah pola pembiayaan dengan pendekatan pinjaman biasa yang dapat digunakan untuk tujuan investasi dan modal kerja.

b. Pola Pembiayaan Modal Ventura Syariah

Pola pembiayaan modal ventura syariah adalah pembiayaan modal ventura yang disesuaikan dengan skema dan prinsip-prinsip syariah.

c. Pola Pembiayaan Modal Ventura Jangka Pendek (PMVJP)

Pola pembiayaan modal ventura jangka pendek (PMVJP) adalah pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja jangka pendek yang dapat bertujuan untuk *bridging cashflow* berdasarkan tagihan (*post financing*).

2.1.2.3. Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Siamat (2004:287) adanya penilaian mengenai kolektibilitas aktiva produktif, mengharuskan perusahaan pembiayaan harus benar-benar melakukan analisis yang baik dan hati-hati atas setiap jenis kegiatan pembiayaan yang dilakukan seperti halnya tingkat kesehatan pada bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat pasal empat, kualitas kredit digolongkan menjadi :

- “(1) Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan :
- a. Lancar, apabila:
 1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 2. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 3. kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau

4. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
- (2) Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih :
- a. Lancar, apabila:
 1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
 2. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3(tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila:
 1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
 2. kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 3. kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 4. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit”.

2.1.2.4. Prinsip Pembiayaan

Pada umumnya lembaga keuangan melakukan beberapa penilaian atas pihak yang akan dibiayai sebelum memberikan pembiayaan. Tidak dijelaskan secara jelas analisis yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura, namun dapat dikatakan analisis pembiayaan yang dilakukan perusahaan modal ventura hampir sama dengan analisis kredit karena aktivitas pembiayaan oleh perusahaan modal ventura saat ini mirip dengan kredit oleh bank. Menurut Hanafi (2009:167) analisis kredit meliputi kerangka 3R dan 5C, di mana kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban

atas pinjamannya kepada pihak yang memberi pinjaman. Penjelasan atas kerangka 3R dan 5 C adalah sebagai berikut :

“A. Pedoman 3 R :

1. *Returns*, berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return (pendapatan) yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya
2. *Repayment capacity*, berhubungan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo
3. *Risk-bearing ability*, berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut

B. Pedoman 5 C :

1. *Character* menunjukkan kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini berhubungan dengan sifat dan watak debitur
2. *Capacity* adalah kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien
3. *Capital* adalah posisi keuangan debitur secara keseluruhan . kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan, seperti analisis rasio
4. *Collateral* adalah aset yang dijaminkan (dijadikan agunan) untuk suatu pinjaman
5. *Conditions* adalah sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman”.

2.1.2.5. Tahap-tahap Pembiayaan Modal Ventura

Menurut Siamat (2004:344) tahap-tahap pembiayaan modal ventura adalah sebagai berikut :

1. *Early Stage Financing*

Tahap awal dari pembiayaan modal ventura meliputi:

a. *Seed Financing*

Pada tahap ini perusahaan modal ventura membiayai kegiatan perusahaan pasangan usaha yang baru melaksanakan penelitian dan riset untuk mengukur *viability* suatu gagasan yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau objek pembiayaan.

b. *Start-up Financing*

Pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura pada tahap ini adalah untuk membiayai pekerjaan yang masih berkisar pada pengembangan produk dan pemasaran.

c. *Find Round Financing*

Dilakukan seluruh kemampuan dalam menyukseskan peluncuran produk PPU.

2. *Expansion Stage*

Pada tahap ekspansi ini pembiayaan modal ventura yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

a. *Second Round Financing*

Pada tahap ini cadangan bahan baku perlu diperbesar untuk menjamin kontinuitas produk.

b. *Third Round Financing*

Pada tahapan ini tambahan modal diperlukan untuk melanjutkan pertumbuhan PPU.

c. *Bridge Financing (Mezzanine)*

Pada tahapan ini pembiayaan diperlukan untuk memperbaiki kondisi keuangan PPU agar dapat lebih *visible* sehingga memenuhi persyaratan untuk *go public* dalam waktu dekat.

d. *Acquisition and Management Buy Out Financing*

Acquisition financing merupakan pembiayaan yang dibutuhkan PPU yang telah berkembang dan memerlukan dana untuk mengakuisisi perusahaan lain.

e. *Turnaround Situations*

Tahap ini dilakukan untuk pembiayaan atas perusahaan dalam posisi kesulitan bahkan bangkrut.

2.1.2.6. Optimalisasi Pembiayaan

Salah satu risiko atas pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan adalah timbulnya pembiayaan bermasalah. Seperti halnya kredit bermasalah yang menurut Ismail (2010:123) akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima, pembiayaan juga akan mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan yang melakukan aktivitas pembiayaan. Dengan kata lain, terjadinya pembiayaan bermasalah mengindikasikan pelunasan pembiayaan oleh pihak yang dibiayai tidak optimal.

2.1.2.6.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Aktivitas pembiayaan oleh perusahaan modal ventura saat ini mirip dengan kredit oleh bank sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian pembiayaan bermasalah tidak jauh berbeda dengan kredit bermasalah. Menurut Ismail (2010:123), “kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank,

dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah”. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan dan pihak yang dibiayai tidak dapat membayarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.2.6.2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sama halnya dengan kredit, aktivitas pembiayaan juga memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Faktor penyebabnya juga tidak jauh berbeda karena pembiayaan yang dilakukan perusahaan modal ventura tidak jauh berbeda dengan kredit oleh bank. Menurut Umam (2010:) faktor penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

“1. Faktor Intern Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* transaksi terhadap nilai agunan
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur

2. Faktor Ekstern Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya

- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja
 - 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*)
- b. Unsur ketidaksengajaan
- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran
 - 2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
 - 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
 - 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur”.

2.1.2.6.3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah oleh perusahaan modal ventura tidak jauh berbeda dengan penanganan kredit bermasalah oleh bank karena aktivitas pembiayaan oleh perusahaan modal ventura yang mirip dengan kredit oleh bank. Penanganan kredit bermasalah di luar proses pengadilan menurut Sutojo (2007:184) antara lain :

1. Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Dalam penanganan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, debitur akan memperoleh kelonggaran dari kreditur dalam bentuk penundaan masa jatuh tempo kredit, atau penjadwalan kembali pembayaran angsuran kredit. Penjadwalan kembali tersebut disesuaikan dengan kondisi arus kas debitur.

2. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Peninjauan kembali seluruh atau sebagian isi perjanjian kredit dilakukan seiring dengan diambinya keputusan *rescheduling* oleh kreditur. Tujuan dilakukannya peninjauan kembali atas perjanjian kredit adalah untuk memperkuat kedudukan kreditur dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi

perjanjian yang biasanya ditinjau kembali adalah jumlah dan jadwal pembayaran angsuran.

3. Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*)

Reorganization and recapitulation di sini berarti debitur perlu menata kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnisnya sehingga operasi bisnis mereka dapat sehat kembali dengan begitu debitur mampu membayar kredit yang telah diberikan oleh kreditur.

Sedangkan dalam Bagraff (2006:31) dijelaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Untuk pembiayaan lancar dilakukan pemantauan usaha nasabah dan pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
2. Untuk pembiayaan kurang lancar dilakukan beberapa hal berikut :
 - a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan *reconditioning* yaitu memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil.
3. Untuk pembiayaan diragukan dilakukan beberapa hal berikut :
 - a. *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
 - b. *Reconditioning* yaitu memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil

- c. Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*
4. Untuk pembiayaan macet dilakukan hal-hal berikut :
- a. *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
 - b. *Reconditioning* yaitu memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil
 - c. Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*
 - d. Dilakukan penyitaan barang jaminan

2.2. Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang struktur pengendalian intern seperti yang dilakukan oleh saudara Ratih Yuniarti 2009 dengan judul “Peranan Struktur Pengendalian Intern terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada Bank 'X' Cabang Surabaya untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah”. Penelitian tersebut menekankan pada analisis atas unsur-unsur pengendalian intern untuk mengevaluasi proses pemberian kredit dalam upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah.

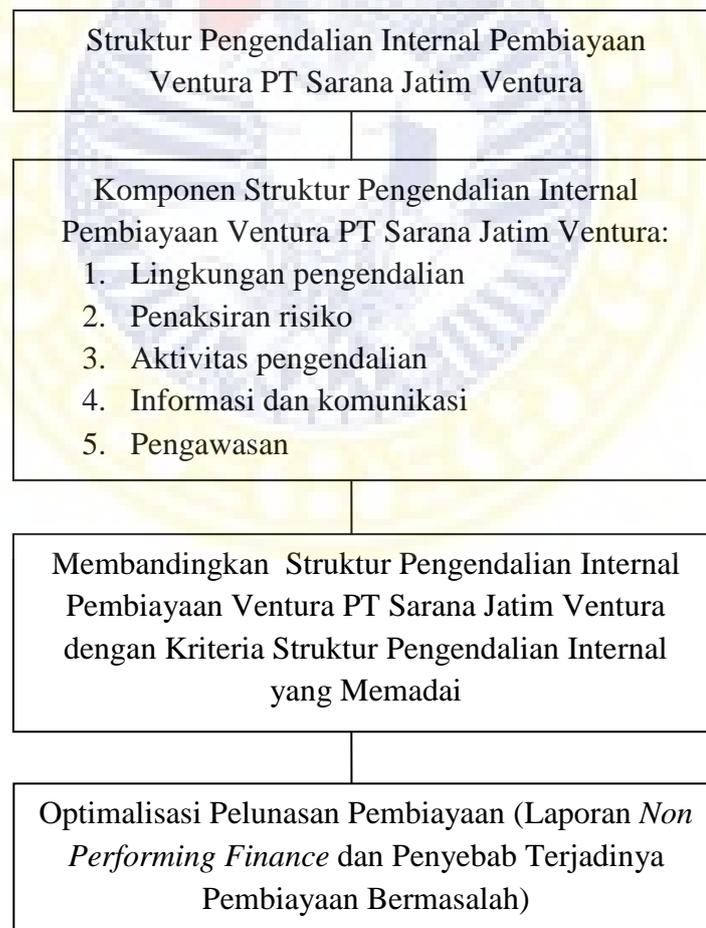
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern dalam mengevaluasi prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Selain itu diperhatikan pula mengenai tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan.

Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi dan waktu penelitian, di mana penulis melakukan penelitian pada jenis lembaga keuangan yang berbeda yaitu

perusahaan modal ventura yang memiliki peraturan dan tingkat risiko pemberian kredit yang berbeda dengan bank. Selain itu peneliti membandingkan struktur pengendalian internal yang ada dengan kriteria struktur pengendalian internal yang memadai yang diadaptasi dari teori terkait komponen struktur pengendalian internal dan *criteria for rating internal control components* yang ada dalam Amudo dan Eno (2009:135).

2.3. Kerangka Berfikir

Untuk menunjang penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pola yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan pada bab satu yaitu, “Bagaimana penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura dan apakah penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura telah memadai sehingga pelunasan pembiayaan ventura dapat optimal”, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus.

Menurut Moleong (2010:6), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Strategi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (2008:1), “Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata”.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan studi penelitian terletak pada struktur pengendalian internal dalam kaitannya dengan aktivitas pembiayaan ventura. Pembiayaan ventura yang dimaksud di sini adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan SJV kepada PPU dengan memberikan dana dalam jumlah, *rate* dan jangka waktu pelunasan tertentu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data mengenai keadaan dan gambaran umum perusahaan (sejarah singkat, visi dan misi, bidang usaha, dan struktur organisasi). Sedangkan data kuantitatif berupa laporan NPF (*Non Performing Finance*) atau tingkat pembiayaan bermasalah.

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber internal perusahaan seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai struktur pengendalian internal pembiayaan ventura, yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pihak yang terkait. Data hasil wawancara meliputi keterangan yang berhubungan dengan teori terkait komponen struktur pengendalian internal dan *criteria for rating internal control components* yang ada dalam Amudo dan Eno (2009:135), di mana akan dikelompokkan menjadi enam kriteria untuk lingkungan pengendalian, tiga kriteria untuk penaksiran risiko, 12 kriteria untuk aktivitas pengendalian, empat kriteria untuk informasi dan komunikasi,

dan dua kriteria untuk pengawasan. Data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah sendiri oleh penulis.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan seperti kebijakan pembiayaan, struktur organisasi, sejarah perusahaan, serta hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan struktur pengendalian internal pembiayaan ventura.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa tahapan yang terdiri dari :

1. Survei pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melakukan kunjungan awal ke PT Sarana Jatim Ventura untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan secara umum, terutama mengenai struktur pengendalian internal pembiayaan ventura serta untuk menetapkan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa literatur dan buku-buku teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai struktur pengendalian internal dan prosedur pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai landasan pemecahan masalah.

3. Survei lapangan

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam di bagian investasi seperti data pelunasan para debitur dan kebijakan pembiayaan perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik antara lain :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada :

- 1) Bapak Widhi Cahyono selaku kepala divisi investasi
- 2) Bapak Noor Alim Fardianto selaku kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan
- 3) Ibu Aisyah Nurhayati selaku bagian umum dan sumber daya manusia (SDM)
- 4) Ibu Nur Fajriyah selaku staf akuntansi
- 5) Ibu Kusumaningdyah Indira Sari selaku staf administrasi investasi
- 6) Ibu Aan Kurniawati selaku kasir
- 7) Bapak Tri Agus Darmawan selaku VCO (*Ventue Capital Officer*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Jatim Ventura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melihat atau memeriksa secara langsung dokumen atau catatan yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura seperti laporan *Non Performing Finance* dan kebijakan pembiayaan perusahaan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dikumpulkan dari penelitian di lapangan baik berupa dokumen maupun hasil wawancara yang kemudian disusun dalam bentuk uraian yang jelas dan terperinci. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun hasil penelitian lapangan mengenai struktur pengendalian internal pembiayaan ventura di PT Sarana Jatim Ventura dalam bentuk tabel, dengan mengelompokkan ke masing-masing komponen struktur pengendalian internal.
2. Membandingkan hasil penelitian yang disebutkan di atas dengan kriteria struktur pengendalian internal yang memadai yang diadaptasi dari teori terkait komponen struktur pengendalian internal dan *criteria for rating internal control components* yang ada dalam Amudo dan Eno (2009:135) sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.
3. Memberikan penilaian tiap komponen struktur pengendalian internal pembiayaan ventura di PT Sarana Jatim Ventura dengan cara :
 - a. Memberi nilai 1 jika sesuai dengan kriteria struktur pengendalian internal yang memadai terkait aktivitas pembiayaan.
 - b. Memberi nilai 0 jika tidak sesuai dengan kriteria struktur pengendalian internal yang memadai terkait aktivitas pembiayaan.
4. Mengevaluasi hasil penilaian struktur pengendalian internal pembiayaan ventura dan laporan *Non Performing Finance* beserta penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada PT Sarana Jatim Ventura.
5. Memberikan kesimpulan dan saran.

Tabel 3.1 Kriteria Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan yang Memadai

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating 1</i>
Lingkungan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen menegaskan pentingnya nilai etika dan integritas kepada seluruh anggota organisasi 2. Karyawan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan jabatan atau tugasnya 3. Dewan komisaris atau komite audit independen dari manajemen 4. Struktur organisasi cukup menggambarkan rantai perintah dan garis pertanggungjawaban secara jelas 5. Tugas atau tanggung jawab terkait aktivitas pembiayaan yang diserahkan kepada bawahan ditindaklanjuti oleh manajemen 6. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia didokumentasikan dan diperbarui
Penaksiran Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan atas aktivitas pembiayaan 2. Seluruh mekanisme pembiayaan yang dilakukan dapat mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi 3. Manajemen melakukan analisis dokumentasi atas data dan informasi calon debitur untuk mengidentifikasi risiko
Aktivitas Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat otorisasi dalam transaksi pembiayaan 2. Dilakukan verifikasi atas transaksi pembiayaan 3. Terdapat pemisahan tugas dalam aktivitas pembiayaan 4. Catatan akun kunci seperti bank dan piutang usaha direkonsiliasi secara rutin 5. Terdapat pembatasan akses ke sumber daya perusahaan 6. Terdapat pertanggung jawaban atas tambahan dana pembiayaan yang diberikan kepada debitur 7. Terdapat auditor internal yang memiliki lingkup tanggung jawab yang tidak dibatasi oleh manajemen 8. Prosedur pembiayaan didokumentasikan dan diperbarui 9. Aktivitas pengendalian yang dirancang untuk aktivitas pembiayaan cukup menggambarkan strategi pengurangan risiko manajemen 10. Dilakukan pengawasan kepada staf yang memiliki tugas terkait aktivitas pembiayaan

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1
Aktivitas Pengendalian	11. Terdapat pembatasan untuk personil yang mengakses keseluruhan modul aplikasi komputer 12. Terdapat prosedur pengamanan dalam mengakses data master debitur
Informasi & Komunikasi	1. Kriteria untuk mengevaluasi kondisi debitur setelah pembiayaan diberikan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang 2. Karyawan terkait aktivitas pembiayaan memahami tanggung jawabnya 3. Informasi yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan diketahui oleh seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas pembiayaan 4. Keluhan dari debitur diselesaikan dengan tepat
Pengawasan	1. Terdapat evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dan independen atas aktivitas pengendalian terkait aktivitas pembiayaan yang dilakukan 2. Terdapat peninjauan secara internal atas penerapan aktivitas pembiayaan

Sumber : Amudo, Angella & Eno L Inanga. 2009. *Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda*, (Online), (<http://www.eurojournals.com/finance.htm>, diakses 3 Maret 2011) dan teori terkait struktur pengendalian internal.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Pengembangan modal ventura di Indonesia dimulai dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 1973. BPUI mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan anak perusahaan yaitu PT Bahana Artha Ventura (BAV) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. BAV memperluas jangkauan pembiayaan perusahaan modal ventura kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Demi meningkatkan kelancaran kegiatan usahanya, terutama dalam rangka mengembangkan sektor UKM, BAV mendirikan anak perusahaan di daerah-daerah atau dengan kata lain mendirikan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sampai saat ini hampir di setiap provinsi terdapat PMVD.

PT Sarana Jatim Ventura merupakan PMVD yang berada di provinsi Jawa Timur. Pendirian PT Sarana Jatim Ventura diprakarsai oleh Departemen Keuangan bersama-sama dengan sejumlah investor, baik perorangan maupun perseroan. Sebagai lembaga keuangan modal ventura, PT Sarana Jatim Ventura telah mendapatkan ijin operasi dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan RI, Bapak Mar'ie Muhammad pada tanggal 15 Oktober 1994 di Surabaya.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Sarana Jatim Ventura

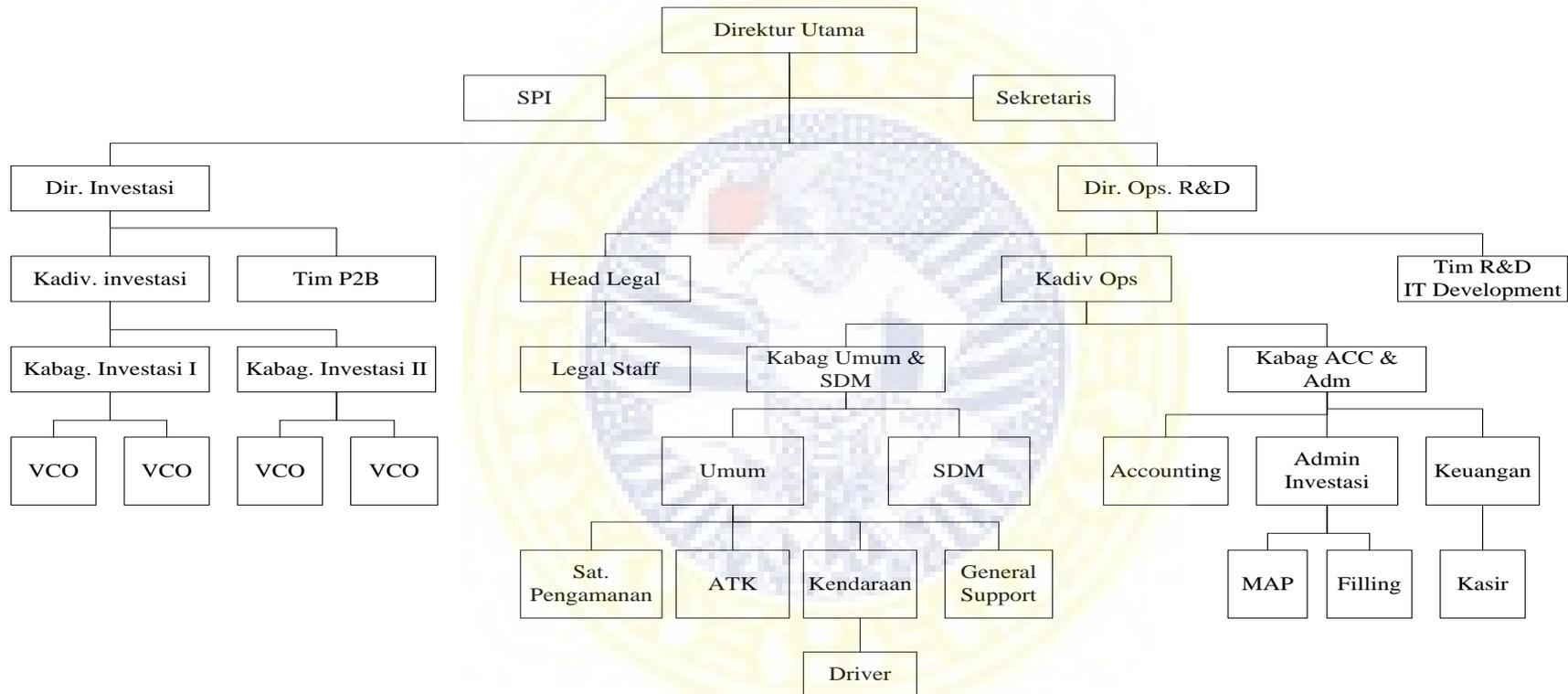
Mitra Sejati Usaha Mandiri.

2. Misi Sarana Jatm Ventura

Membentuk usaha kecil dan menengah menjadi suatu perusahaan yang tangguh dan mandiri.



4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Sarana Jatim Ventura

Sumber : Data Internal Perusahaan

4.1.4. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Masing-Masing Fungsi

1. Kepala Divisi Investasi

- a. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala bagian Investasi I dan II
- b. Otorisasi pengeluaran dana untuk investasi
- c. Melakukan seleksi awal atas usulan pembiayaan dari CPPU
- d. Memberikan masukan kepada direksi mengenai pengembangan investasi

2. Kepala Bagian Investasi

- a. *Mereview* tugas dan kewajiban VCO
- b. Melakukan *marketing*
- c. Melakukan pengawasan dan pengembangan usaha PPU
- d. Melakukan seleksi awal atas usulan pembiayaan dari CPPU dan mendistribusikan ke VCO
- e. Mengembangkan VCO bawahannya

3. *Venture Capital Officer (VCO)*

- a. Melakukan *marketing*/mencari prospek investasi pada CPPU/PPU
- b. Melakukan penggalan data dan negosiasi sebatas kebijaksanaan perusahaan
- c. Membuat proposal investasi
- d. Membuat *draft* isi pokok-pokok perjanjian dengan CPPU/PPU
- e. Mengusulkan pencairan dana dari hasil permohonan pencairan dana CPPU/PPU
- f. Merencanakan jadwal pembayaran (*statement of account, installment* dan lain-lain)

- g. Melakukan pengawasan atas investasi yang telah dilakukan terhadap PPU agar dapat mencapai target yang telah diproyeksikan sebelumnya
 - h. Melakukan *collecting* bagi hasil dan pokok
 - i. Menentukan kondisi kesehatan PPU
 - j. Melakukan program penyehatan PPU
 - k. Melakukan sosialisasi, pembinaan/pemeliharaan dan konsultasi untuk PPU
 - l. Menganalisa kondisi dan permasalahan yang dihadapi PPU (dengan data yang didukung dari administrasi investasi) untuk mencari solusi yang baik berupa restrukturisasi
 - m. Membuat proposal restrukturisasi
 - n. Meningkatkan hasil penagihan atas investasi macet yang masuk dalam penanganan *remedial* (dengan data yang didukung dari administrasi investasi dan akuntansi/keuangan) melalui upaya-upaya penjualan asset maupun restrukturisasi dan *rescheduling*
 - o. Menyusun *draft* isi pokok-pokok perjanjian terhadap PPU bermasalah
 - p. Melakukan *legal action* bersama-sama dengan *legal officer*
4. Staf Legal
- a. Mengumpulkan data bersama-sama dengan VCO menyangkut dokumen hukum yang meliputi dokumen perusahaan, dokumen menyangkut asset CPPU/PPU, dokumen menyangkut perjanjian dengan pihak ketiga termasuk perjanjian hutang piutang dengan pihak bank dan dokumen yang menyangkut perijinan

- b. Memberikan nasehat hukum, opini dan saran-saran baik kepada VCO, direksi, komite investasi, CPPU/PPU
 - c. Menyusun surat konfirmasi bersama-sama dengan VCO
 - d. Menyusun surat perjanjian bersama-sama dengan kantor notaris
 - e. Melakukan penilaian terhadap jaminan
 - f. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan VCO terhadap penggunaan jaminan
 - g. Melakukan *filling* data dokumen legal yang masuk dan keluar
 - h. Menyelesaikan proses divestasi PPU secara hukum
 - i. Menyelesaikan sengketa hukum
5. Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan
- a. Mengawasi jalannya kegiatan keuangan dan akuntansi perusahaan
 - b. Mengatur alokasi penempatan deposito perusahaan
 - c. Mengatur saldo kas perusahaan
 - d. Sebagai pengawas penyajian laporan keuangan
6. Staf Akuntansi
- a. Melakukan penjurnalan transaksi bank masuk, bank keluar, *memorial*, dan *adjustment*
 - b. Melakukan proses *posting*, menyusun laporan laba rugi, neraca, arus kas serta laporan lainnya
 - c. Membuat laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi
 - d. Membuat penjelasan pos-pos neraca dan laba rugi
 - e. Membuat daftar investasi jangka pendek dan pendapatan (deposito)

- f. Membuat daftar pendapatan dari PPU (bagi hasil)
 - g. *Filling* dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi bank masuk, bank keluar, *memorial*, dan *adjustment*
 - h. Membuat perhitungan biaya penyusutan asuransi kebakaran gedung
 - i. Membuat perhitungan biaya penyusutan asuransi kendaraan perusahaan
 - j. Melakukan *cross check* daftar investasi jangka panjang dengan bagian administrasi investasi sesuai dengan neraca perusahaan
 - k. Menyusun/membuat buku laporan keuangan perusahaan
 - l. Membuat laporan pembiayaan bagi hasil, *annual fee*, *sinking fund*, dan *installment* setiap minggu untuk kepentingan divisi investasi
7. Staf Administrasi Investasi
- a. Mempelajari kondisi kesehatan PPU dan melakukan hal-hal berikut ini,
 - 1) Pengumpulan data proyeksi penjualan dan laba masing-masing PPU
 - 2) Pengumpulan data realisasi penjualan dan laba masing-masing PPU
 - 3) Pengumpulan data *cash in* PPU untuk dibandingkan dengan prediksi yang direncanakan akan diperoleh
 - 4) Pengumpulan data piutang PPU
 - 5) Pengumpulan hasil perhitungan *bombing point* masing-masing PPU per masing-masing VCO
 - 6) Rekapitulasi final kondisi kesehatan PPU
 - 7) Pembuatan laporan kondisi kesehatan seluruh PPU untuk kepentingan manajemen dan eksternal

- b. Melakukan catatan usaha PPU
 - 1) Penerimaan laporan PPU dan pembuatan *record* kedatangan laporan PPU
 - 2) Rekap laporan masing-masing PPU
 - 3) Meneliti kewajaran laporan PPU
 - 4) Membuat opini beberapa catatan usaha PPU sekaligus memberikan EWS kepada VCO yang bersangkutan
- c. Pembuatan laporan-laporan
 - 1) Membuat laporan perkembangan PPU
 - 2) Membuat laporan kondisi kesehatan PPU
 - 3) Membuat laporan untuk penetapan bagi hasil riil PPU
 - 4) Pembuatan BIR (*Basic Information Report*)
- d. Membuat laporan aktual yang riil dan menganalisa kondisi pembayaran dan piutang PPU
- e. Memberikan informasi terhadap data-data keuangan PPU, prospek dan perkembangan usaha PPU yang diajukan kepada direksi
- f. Membuat laporan aktual yang riil dan menganalisa kondisi-kondisi keuangan perusahaan dan biaya-biaya operasional yang diajukan kepada direksi
- g. Pembuatan laporan untuk eksternal
 - 1) PT Bahana Artha Ventura : realisasi pembiayaan Jexim, CPPU Jexim yang akan dibiayai, CPPU Prospek, Investasi jangka panjang
 - 2) PPU : *statement of account* dan pengiriman surat mengenai *annual fee* dan *installment*

h. Pembuatan laporan untuk internal

- 1) Pembuatan jurnal PPU : meliputi perjanjian kerja sama, legalitas PPU, kependudukan, asuransi, jaminan dan peminjaman jaminan
- 2) Pengisian kartu piutang: bagi hasil, *annual fee* dan *installment/sinking fund*
- 3) Laporan piutang : bagi hasil, *annual fee* dan *installment/sinking fund*
- 4) Pengisian buku *outstanding*
- 5) Agenda CPPU
- 6) Penerimaan pembayaran bagi hasil

i. Melakukan korespondensi untuk CPPU

j. *Filling*

- 1) File master PPU
- 2) File biru PPU
- 3) File CPPU

8. Kasir

- a. Melakukan penjurnalan transaksi kas
- b. Melakukan penyimpanan *petty cash*
- c. Menulis BG/*cheque*, mengeluarkan dan menerima uang
- d. Melaksanakan prosedur harian kasir
- e. Merekap perjalanan dinas VCO
- f. Merekap perjalanan dinas *driver*
- g. Mem-*file* dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kas kecil

4.1.5. Produk Pembiayaan

Sarana Jatim Ventura menawarkan tiga jenis pembiayaan, antara lain :

1. Penyertaan Modal

Penyertaan modal diwujudkan dalam bentuk saham biasa bagi usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang nantinya akan diambil alih kembali oleh pemilik atau investor lainnya.

2. Obligasi Konversi

Merupakan obligasi yang bisa dikonversikan ke dalam saham perusahaan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk Perseroan Terbatas.

3. Pembiayaan Pola Bagi Hasil

Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan pola bagi hasil menurut prosentase tertentu yang disepakati. Pola bagi hasil yang diterapkan ada dua macam yaitu :

a. Bagi Hasil Murni

Dalam pembiayaan bagi hasil murni telah ditentukan porsi yang menjadi bagian keuntungan Jatim Ventura dan porsi yang menjadi keuntungan PPU. Pola bagi hasil ini digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk proyek. Pembayaran bagi hasil yang menjadi porsi Jatim Ventura dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, misalnya tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap semester, atau tiap tahun.

b. Bagi Hasil Terkelola

Dalam pembiayaan pola bagi hasil terkelola, dikenal adanya bagi hasil minimal dan bagi hasil maksimal. Bagi hasil minimal adalah bagi hasil yang

minimal diperoleh dan bagi hasil maksimal adalah bagi hasil yang maksimal hanya diperoleh oleh Sarana Jatim Ventura. Besar bagi hasil minimal dan maksimal dihitung dari prosentase yang telah ditetapkan atas jumlah pembiayaan. Bagi hasil maksimal dan minimal tersebut akan dibandingkan dengan besar bagi hasil yang dihitung dari prosentasi keuntungan yang diperoleh PPU. Jadi apabila bagi hasil yang diperoleh menurut perhitungan porsi bagi hasil lebih rendah dari pada bagi hasil minimal, maka Sarana Jatim Ventura memperoleh bagi hasil minimal tersebut. Namun apabila bagi hasil yang diperoleh menurut perhitungan porsi bagi hasil lebih tinggi dari pada bagi hasil maksimal, Sarana Jatim Ventura hanya memperoleh bagi hasil maksimal tersebut.

4.1.6. Tahapan Pembiayaan

Tahapan pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Jatim Ventura dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Tahapan Pra-Investasi

Tahapan pra-investasi terdiri dari :

- a. Tahapan Pra Analisis

Tahapan pra analisis ditangani oleh *Venture Capital Officer (VCO)* dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Pada tahap pra analisis ada dua hal yang dilakukan yaitu :

- 1) Identifikasi

Tahapan identifikasi merupakan tahapan untuk mengetahui dan menilai apakah proposal yang diajukan oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)

termasuk dalam lingkup kriteria penanganan PT Sarana Jatim Ventura (SJV).

Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan adalah :

- a) Pertemuan awal dengan CPPU untuk mengetahui maksud dan rencana perusahaan
- b) Mempelajari proposal atau data informasi CPPU

Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam tahapan ini meliputi latar belakang, manajemen, penjualan dan pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, administrasi dan pengawasan, perpajakan, aspek hukum, dan dana yang dibutuhkan CPPU. Apabila pada tahapan ini SJV menilai bahwa CPPU bukan merupakan target penanganan SJV dan dinilai bukan merupakan calon PPU yang cukup potensial untuk dibiayai, maka SJV segera mengirimkan surat penolakan kepada CPPU yang bersangkutan.

2) Evaluasi Pendahuluan

Evaluasi pendahuluan merupakan kelanjutan dari proses identifikasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah CPPU tersebut termasuk dalam lingkup penanganan SJV. Dalam tahap ini pada prinsipnya dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap proposal dan informasi-informasi yang telah diterima sebagai langkah awal persiapan melakukan evaluasi lebih lanjut. Pada tahapan ini secara garis besar dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

- a) Diskusi dengan pemilik dan pengelola untuk memperjelas tujuan dan rencana perusahaan
- b) Mempelajari lebih mendalam terhadap proposal dan kejelasan atas data yang telah diberikan oleh CPPU

- c) Mengumpulkan dan mempelajari data-data pendukung dari luar porposal untuk lebih menyempurnakan asumsi-asumsi yang telah dibuat oleh CPPU dalam penyusunan proyeksi

Informasi yang diperlukan dalam tahapan ini adalah antara lain :

- a) Kewajaran usulan proyek, yang meliputi :

- (1) Asumsi-asumsi dasar dan pendukung sebagai dasar penyusunan usulan proyek
- (2) Kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh CPPU

- b) Prospek bisnis dan usaha di waktu mendatang, yang meliputi :

- (1) Permasalahan yang ada dan yang mungkin timbul
- (2) Peluang yang ada dan mungkin diciptakan
- (3) Kekuatan dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya
- (4) Rencana dan strategi perusahaan untuk meningkatkan prestasi perusahaan

b. Tahapan Kunjungan Lapangan

Tahapan kunjungan lapangan ditangani oleh *Venture Capital Officer* (VCO) dan *Legal Officer* (LO) dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Kunjungan lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila proses identifikasi dan evaluasi pendahuluan telah dilaksanakan dan tujuan dari proses tersebut tercapai. VCO mengajukan usulan untuk melakukan kunjungan lapangan dengan menggunakan form usulan kunjungan.

Kunjungan lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan memperoleh keyakinan atas gambaran dan asumsi-asumsi yang dimuat baik

dalam proposal yang diajukan oleh CPPU maupun dari hasil pembicaraan dan diskusi dengan CPPU. Kunjungan lapangan bukan berarti hanya mengunjungi lokasi perusahaan CPPU saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengunjungi atau melihat lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut atau yang dapat memberikan data dan informasi yang mendukung, misalnya lokasi *supplier*, lokasi penjualan, lokasi perusahaan lain yang sejenis atau kondisi perusahaan pesaing, lokasi barang jaminan, dan sebagainya.

Hasil kunjungan lapangan oleh VCO dilaporkan VCO dan LO dalam bentuk *Basic Information Report*. Apabila setelah dilakukan tahapan ini, ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan proposal dan keterangan awal CPPU atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi penilaian pendahuluan sehingga CPPU dinilai tidak cukup potensial, maka SJV dapat segera mengirimkan surat penolakan yang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.

c. Tahapan Analisis

Tahapan analisis ditangani oleh *Venture Capital Officer (VCO)* dengan persetujuan oleh *General Manager*. Pada tahap ini VCO dapat melakukan revisi atas asumsi dan proyeksi yang diperoleh dari hasil kunjungan lapangan sehingga menghasilkan proyeksi yang wajar yang dituliskan pada *form* analisis, sedangkan *Legal Officer (LO)* melakukan analisis terhadap aspek-aspek legalitas perusahaan yang dituliskan pada *form* analisis yuridis. Dalam proses ini dilakukan proses evaluasi yang lebih mendalam, menyeluruh dan terpadu dalam semua aspek manajemen CPPU. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara

lebih terperinci mengenai layak atau tidaknya SJV melakukan pembiayaan kepada CPPU tersebut.

d. Tahapan Presentasi

Tahapan presentasi ditangani oleh *Internal Committee* PT Sarana Jatim Ventura dengan persetujuan oleh *Investment Committee*. Hasil analisis yang ada pada *form* analisis dan analisis yuridis yang telah disetujui oleh *General Manager*, akan dipresentasikan di hadapan *Internal Committee*. Anggota dari *Internal Committee* adalah semua VCO, LO, bagian Administrasi Investasi, *General Manager*, dan Direksi SJV. Hasil dari presentasi ini akan disajikan dalam *Committee Approval* dimana hasilnya bisa berupa :

- 1) Disetujui, maka dilanjutkan pada tahap penyusunan Proposal Investasi untuk diajukan kepada *Investment Committee*
- 2) Revisi, maka VCO harus melakukan perbaikan atau penggalian data dan informasi lebih lanjut sesuai yang disyaratkan oleh *Internal Committee*, untuk kemudian dipresentasikan ulang sampai ada keputusan disetujui atau ditolak oleh *Internal Committee*
- 3) Ditolak, maka SJV dapat segera mengirimkan surat penolakan yang disertai dengan alasan-alasan yang tepat

e. Tahapan Proposal Investasi

Tahapan proposal investasi ditangani oleh *Venture Capital Officer (VCO)* dengan persetujuan oleh Direksi PT Sarana Jatim Ventura. Hasil evaluasi atas kelima aspek manajemen (*Market*, Produksi, Manajemen & Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan) yang dilakukan oleh VCO, LO, dan *Internal*

Committee dituangkan dalam satu bentuk Proposal Investasi. Proposal Investasi akan menjadi dasar bagi *Investment Committee* untuk menilai serta mengevaluasi proyek dan memberikan persetujuan bagi SJV untuk melakukan pembiayaan kepada CPPU yang dituliskan pada lembar persetujuan.

f. Tahapan Persetujuan

Berdasarkan Proposal Investasi maka *Investment Committee* akan mengevaluasi dan memberikan persetujuan pembiayaan kepada CPPU yang dituliskan pada lembar persetujuan. Dalam tahapan ini tetap tidak menutup kemungkinan bagi SJV untuk tidak menyetujui/menolak proposal investasi, apabila ternyata di dalam hasil evaluasi ditemukan hal-hal yang memberatkan untuk melakukan pembiayaan atau selama proses evaluasi ternyata terjadi hal-hal yang mempengaruhi penilaian terhadap proposal investasi tersebut. Mekanisme dalam tahapan persetujuan investasi diatur lebih lanjut di dalam Surat keputusan Direksi dan Surat Keputusan Komisaris PT Sarana Jatim Ventura, tentang anggota *Investment Committee*.

g. Tahapan Analisis Legal

Tahapan analisis legal ditangani oleh *Legal Officer* (LO) dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Tahapan ini sebenarnya dilakukan bersama-sama dengan tahapan analisis yang dilakukan oleh VCO sebagai hasil kunjungan lapangan yang dilakukan secara bersama-sama antara VCO dan LO. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh LO akan disajikan dalam laporan berupa Analisis Yuridis, yang memuat aspek legalitas usaha CPPU, analisis yuridis, kelengkapan legalitas, saran-saran, logal opini, dsb. Hasil analisis

yuridis ini tidak terpisahkan dari proposal investasi, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan persetujuan pembiayaan pada setiap level. Selain itu, hasil dari proposal dan analisis yuridis akan menjadi dasar penyusunan surat konfirmasi dan pengikatan perjanjian pembiayaan apabila suatu usulan pembiayaan telah disetujui oleh *Investment Committee*.

2. Tahapan Investasi

Tahapan investasi terdiri dari :

a. Tahapan Pengikatan

Tahapan pengikatan ditangani oleh *Venture Capital Officer* (VCO) dan *Legal Officer* (LO) dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Dalam tahapan ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh PT Sarana Jatim Ventura, yaitu :

1) Penyusunan dan Penandatanganan Surat konfirmasi

Di dalam proposal investasi yang sudah disetujui, dicantumkan beberapa syarat dan ketentuan untuk rencana pembiayaan tersebut. Syarat dan ketentuan akan dituangkan dalam Surat Konfirmasi sebagai tanda persetujuan CPPU. Surat konfirmasi ini akan ditampung dalam dokumen Perjanjian Antar Pihak dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan-kesepakatan lainnya. Surat konfirmasi berikut ketentuan pendanaan ini dikirim kepada CPPU setelah ditandatangani oleh Direksi PT Sarana Jatim Ventura. Pihak CPPU apabila telah menyetujui syarat dan ketentuan tersebut juga akan menandatangani surat konfirmasi di atas materai dan mengembalikannya kepada PT Sarana Jatim Ventura.

2) Penyusunan dan Penandatanganan Akta Perjanjian

Surat konfirmasi yang telah disetujui baik oleh pihak SJV dan CPPU tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Akta Perjanjian dan akta-akta penunjang lainnya seperti akta pengikatan jaminan. Untuk menyusun akta perjanjian ini dapat dilakukan oleh pihak SJV sendiri, tetapi juga dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti Notaris atau Konsultan Hukum. Sedangkan untuk penandatanganannya dilakukan secara Notarial atau dengan pengesahan Notaris.

b. Tahapan Implementasi dan Realisasi

Tahapan implementasi dan realisasi ditangani oleh bagian Administrasi dan Keuangan dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Pada tahapan ini, beberapa aktivitas yang dilakukan SJV adalah sebagai berikut :

1) Tahapan Pencairan Dana

Usulan pencairan dana dilakukan setelah seluruh akta telah ditandatangani dan syarat telah dilengkapi sesuai dengan yang disepakati. Usulan pencairan dana diajukan oleh VCO melalui Nota Penurunan Pembiayaan (NPP) dengan meminta rekomendasi dari bagian hukum (setelah memeriksa dokumen yang diperlukan) dan Direksi SJV. Pada setiap usulan pencairan dana, dokumen yang harus terlampir adalah sebagai berikut :

- a) Surat permohonan pencairan dana dari PPU
- b) Rencana penggunaan dana dari PPU
- c) Daftar kelengkapan dokumen yang berupa *list* dari seluruh dokumen yang sudah dilengkapi berikut keterangannya

d) Opini hukum dari *Legal Officer* yang sudah disetujui oleh Direksi SJV

2) Tahapan Implementasi/Realisasi

Di dalam implementasi/realisasi proyek, SJV wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana. Setiap dana yang akan dicairkan dari '*Joint Account*' harus disertai dengan surat permohonan dari PPU yang berisi jumlah, waktu pencairan, and tujuan penggunaan dana. Permohonan pencairan dana harus disetujui oleh SJV sebelum pencairan. Penggunaan dana harus sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama sebelumnya baik yang tercantum dalam proyeksi maupun rencana kerja tahun tersebut dan apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam rencana harus mendapatkan persetujuan dari SJV.

c. Tahapan *Monitoring*

Tahapan *monitoring* ditangani oleh *Venture Capital Officer* (VCO) dan *Remedial Officer* (RO) dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Tujuan dari kegiatan *monitoring* adalah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan sebagai langkah untuk mengamankan dana SJV yang telah diinvestasikan dan sebagai kelanjutannya adalah untuk memberikan nilai lebih (*value added*) kepada investasi yang telah dilakukan SJV. Kegiatan *monitoring* wajib dilakukan oleh SJV secara terus-menerus sejak dilakukan pencairan dana dan selama masa investasi sampai dengan divestasi selesai, dan dilaporkan dalam bentuk *Call Report*.

d. Tahapan Divestasi

Tahapan divestasi ditangani oleh *Venture Capital Officer* (VCO) dan *Remedial Officer* (RO) dengan persetujuan oleh *General Manager* dan/atau Direksi. Tahapan divestasi adalah tahapan pada saat SJV memutuskan hubungan hukum dengan PPU, dengan cara PPU mengembalikan instrumen pembiayaan SJV. Tahapan Divestasi dapat dibedakan menjadi :

1) Divestasi positif

Apabila pengembalian instrumen pembiayaan yang dimiliki SJV memperoleh nilai tambah atau *gain*.

2) Divestasi negatif

Apabila pengembalian instrumen pembiayaan yang dimiliki SJV mengalami kerugian.

Cara yang digunakan dalam tahap divestasi tergantung dari jenis pembiayaan yang dilakukan oleh SJV yaitu sebagai berikut :

1) Pembiayaan Pola Bagi Hasil

- a) Pengembalian pokok pembiayaan secara bertahap dan teratur setiap periode sampai selesai
- b) Pengembalian pokok pembiayaan secara sekaligus di akhir jangka waktu pembiayaan atau pada saat jatuh tempo

2) Pembiayaan Obligasi Konversi

- a) Penjualan kepada PPU yang bersangkutan dengan perhitungan harga yang telah disepakati sebelumnya
- b) Penjualan kepada investor baru

3) Pembiayaan dengan Penyertaan Saham

- a) Penjualan saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*)
- b) Penjualan saham kepada pemegang saham istimewa/pendiri
- c) Penjualan kepada manajemen PPU
- d) Penjualan saham kepada pihak ketiga (investor baru)

Penentuan waktu dilakukan divestasi ditentukan oleh :

- 1) Berakhirnya perjanjian kerja sama sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian
- 2) Permintaan PPU untuk mengakhiri kerja sama sebelum jatuh tempo
- 3) Permintaan SJV untuk mengakhiri kerja sama sebelum jatuh tempo

Aktivitas dan prosedur yang dilakukan dalam tahap divestasi adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan Surat Usulan Divestasi

Yang mengajukan surat tersebut adalah pihak yang meminta divestasi sebelum jatuh tempo. Apabila divestasi dilakukan pada saat jatuh tempo, maka pihak yang mengajukan surat usulan adalah SJV.

2) Pembahasan Usulan Divestasi

Usulan divestasi yang telah diajukan tersebut akan dibahas oleh pihak SJV dengan beberapa tahap pembahasan, yaitu pembahasan oleh Tim Divestasi (VCO, LO) dan Komite Divestasi. Pembahasan usulan divestasi tersebut meliputi perhitungan nilai divestasi dan alternatif pelaksanaan divestasi.

3) Pelaksanaan (transaksi) Divestasi

Pelaksanaan divestasi dilakukan apabila usulan investasi yang telah dibahas oleh Tim dan Komite Divestasi dituangkan ke dalam *internal memorandum* (proposal divestasi) yang telah disetujui oleh Direksi. Pelaksanaan divestasi harus dilakukan dengan akta otentik (oleh dan di hadapan Notaris).

4.2. Pembahasan

Jenis pembiayaan Sarana Jatim Ventura terhadap PPU yang dilakukan saat ini sebagian besar dalam bentuk pembiayaan bagi hasil terkelola. Pembiayaan pola bagi hasil terkelola yang dilakukan SJV saat ini tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan bagi hasil terkelola pada SJV saat ini mirip dengan kredit pada bank, di mana besar bagi hasil sebenarnya lebih condong ke tingkat bunga seperti kredit pada umumnya.

Sesungguhnya besar bagi hasil dihitung dari prosentase keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang dibiayai, namun bagi hasil yang diterapkan SJV dihitung dari prosentase jumlah pembiayaan yang diberikan. Selain itu, menurut Siamat (2004:343) “Dalam pembiayaan bagi hasil, PPU tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran secara tetap kepada PMV dan jaminan bukan hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh PPU”. Namun pada praktiknya saat ini sebagian besar jumlah pembayaran yang diterima SJV dari PPU tetap setiap bulan dan setiap pembiayaan diwajibkan *tercover* oleh jaminan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis dan interpretasi atas struktur pengendalian internal pembiayaan ventura pada PT Sarana Jatim Ventura .

Tabel 4.1 Analisis Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan Ventura PT Sarana Jatim Ventura

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Lingkungan Pengendalian	1. Manajemen menegaskan pentingnya nilai etika dan integritas kepada seluruh anggota organisasi.	1. Perusahaan memiliki kode etik atau peraturan perilaku secara tertulis yang ada dalam buku yang bernama peraturan perusahaan yang diberikan dan disosialisasikan kepada setiap karyawan.	1
	2. Karyawan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan jabatan atau tugasnya.	2. a) Tingkat pendidikan para staf terkait aktivitas pembiayaan sesuai dengan jabatan dan tugasnya di mana tingkat pendidikan staf administrasi investasi S1 akuntansi, staf <i>accounting</i> S1 akuntansi, kasir S1 manajemen, dan para VCO S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 IESP. Namun tidak ada kebijakan perekrutan karyawan secara tertulis yang memuat tentang ketentuan tingkat pendidikan karyawan. b) Dilakukan pelatihan untuk para staf divisi investasi dalam bentuk seminar mengenai kelayakan usaha, kelayakan jaminan, dan lain-lain, sedangkan untuk bagian <i>accounting</i> , administrasi dan keuangan pelatihan dilakukan dalam bentuk kursus seperti brevet dan seminar-seminar yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Pelatihan dilakukan apabila dianggap perlu seperti pelatihan atas penilaian kondisi kesehatan yang dilakukan saat ada perubahan kategori kondisi kesehatan di mana dulu ada empat kategori dan sekarang ada lima kategori serta perubahan bobot penilaian kondisi kesehatan PPU.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Lingkungan Pengendalian	3. Dewan komisaris atau komite audit independen dari manajemen.	3. Dewan komisaris berasal dari pihak pemegang saham yang independen dari manajemen yaitu dari BAV (Bahana Artha Ventura) dan BPUI (Bahana Pembinaan Usaha Indonesia).	1
	4. Struktur organisasi cukup menggambarkan rantai perintah dan garis pertanggungjawaban secara jelas.	4. Struktur organisasi cukup menggambarkan rantai perintah dan garis pertanggungjawaban secara jelas. Rantai perintah dan garis pertanggungjawaban tersebut telah dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi terutama para pihak yang terkait aktivitas pembiayaan yaitu bagian investasi dan bagian administrasi, <i>acc.</i> dan keuangan.	1
	5. Tugas atau tanggung jawab terkait aktivitas pembiayaan yang diserahkan kepada bawahan ditindaklanjuti oleh manajemen.	5. a) Kepala bagian <i>accounting</i> , administrasi dan keuangan memeriksa seluruh data/hasil pekerjaan staf bawahannya. Seluruh data yang akan keluar dari bagian <i>accounting</i> , administrasi, dan keuangan diperiksa dan disetujui oleh kepala bagian <i>accounting</i> , administrasi. b) Kepala divisi investasi memeriksa seluruh data/hasil pekerjaan VCO. Seluruh data yang akan keluar dari bagian investasi diperiksa dan disetujui oleh kepala divisi investasi.	1
	6. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia didokumentasikan dan diperbarui.	6. Kebijakan sumber daya manusia terkait perekrutan, pelatihan, promosi karyawan, tunjangan, dan pengupahan dibukukan dalam peraturan perusahaan yang diberikan kepada seluruh karyawan. Kebijakan sumber daya manusia perusahaan <i>direview</i> , diperbarui, dan didaftarkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kurang lebih lima tahun sekali. Kebijakan yang pernah diperbarui adalah kebijakan terkait tunjangan dan pengupahan.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Penaksiran Risiko	1. Manajemen mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan atas aktivitas pembiayaan.	<p>1. Manajemen mengidentifikasi risiko atas aktivitas pembiayaan dengan cara melakukan analisis sebelum melakukan pembiayaan kepada PPU. Analisis yang dilakukan yaitu :</p> <p>a. Analisis yuridis baik untuk CPPU badan hukum, perorangan, maupun badan usaha yang meliputi analisis data CPPU, akta pendirian, akta perubahan, susunan pemegang saham, susunan pengurus, perijinan usaha, jaminan yang diberikan, dokumen perijinan jaminan, dokumen kependudukan, pengikatan pembiayaan, dan hubungan hukum dengan pihak lain.</p> <p>b. Analisis atas <i>existing and planning of production</i> meliputi bahan baku, produktivitas, dan pasar, analisis <i>existing and forecasting of financial</i> meliputi neraca, laporan laba rugi, dan rasio-rasio (<i>liquidity, leverage, and activity</i>), analisis <i>existing and planning of legal aspect</i> meliputi <i>legality</i> (konfirmasi, perjanjian, jaminan) dan <i>insurance (life, assets)</i> seperti yang ada pada <i>form</i> analisis.</p> <p>c. Analisis tentang usaha CPPU. VCO akan melakukan <i>due diligence</i> untuk melihat performa usaha CPPU. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat mutasi tabungan atau rekening koran, nota penjualan, serta akan dilakukan konfirmasi ke <i>supplier</i> dan pelanggan atau bisa juga ke pihak <i>bowhir</i> (pemberi kerja) jika CPPU mendapatkan pekerjaan yang dibuktikan dengan dokumen berupa SPK (Surat Perintah Kerja) atau <i>Purchasing Order (PO)</i>.</p>	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Penaksiran Risiko	2. Seluruh mekanisme pembiayaan yang dilakukan dapat mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.	<p>2. a) Dilakukan pengawasan atas kondisi PPU dengan membuat laporan kesehatan bagi masing-masing PPU setiap bulan di mana di dalamnya terdapat penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk faktor yang dinilai dan bobot masing-masing penilaian, dijelaskan pada Pedoman Penilaian Kondisi Kesehatan PPU. Perusahaan menetapkan lima kategori kondisi kesehatan PPU yaitu sehat, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kondisi kesehatan masing-masing PPU ditentukan dari hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif.</p> <p>b) VCO tidak melakukan pengawasan seperti yang telah ditetapkan pada tahapan pembiayaan. Pengawasan dalam bentuk peninjauan lapangan kepada PPU tidak dilakukan secara rutin. Peninjauan lapangan hanya dilakukan kepada PPU yang mulai ada indikasi bermasalah seperti keterlambatan pembayaran selama tiga bulan atau terjadi penurunan prospek usaha PPU.</p>	0
	3. Manajemen melakukan analisis dokumentasi atas data dan informasi calon debitur untuk mengidentifikasi risiko.	<p>3. a) Staf legal menganalisis dokumen jaminan, legalitas/ yuridis PPU (seperti akta pendirian PPU).</p> <p>b) VCO menganalisis laporan keuangan PPU. Jika CPPU tidak memiliki atau tidak membuat laporan keuangan, maka VCO akan menganalisis rekening koran dan catatan keuangan sederhana seperti daftar pemasukan, pengeluaran, catatan hutang, dan catatan piutang CPPU.</p>	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Aktivitas Pengendalian	1. Terdapat otorisasi dalam transaksi pembiayaan.	<p>1. a) Pembiayaan dilakukan setelah ada otorisasi dari dewan direksi atau komisaris melalui rapat komite. Untuk pembiayaan 500 juta ke bawah otorisasi oleh dewan direksi, lebih dari 500 juta memerlukan otorisasi dari satu orang komisaris dan lebih dari satu milyar memerlukan otorisasi dua orang komisaris (baik ketua maupun anggota namun yang diutamakan adalah pemegang saham terbesar yaitu BAV). Otorisasi ini berlaku baik untuk pengajuan pembiayaan baru atau tambahan fasilitas pembiayaan</p> <p>b) NPP (Nota Penurunan Pembiayaan) dan PPD (Permohonan Pencairan Dana) ditandatangani oleh VCO sebagai pihak yang membuat, kepala bagian dan kepala divisi investasi sebagai pihak yang memeriksa, bagian legal sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan bahwa <i>form</i> tersebut telah <i>clear/jelas</i>, staf administrasi investasi dan kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan sebagai pihak yang menerima <i>form</i> tersebut dan direksi sebagai pihak yang menyetujui. Dana akan cair apabila NPP dan PPD telah ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang.</p> <p>c) Bukti bank keluar dan cek untuk pencairan dana ditandatangani oleh kasir sebagai pihak yang membuat, kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan sebagai pihak yang memeriksa dan direksi sebagai pihak yang menyetujui</p>	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Aktivitas Pengendalian		d) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan setelah ada otorisasi oleh direksi melalui rapat komite yang kemudian diajukan kepada dewan komisaris untuk disetujui.	
	2. Dilakukan verifikasi atas transaksi.	2. Saat tutup buku dilakukan verifikasi atas saldo akun pada laporan keuangan dengan bukti-bukti transaksi serta dilakukan pengecekan saldo ke bank untuk mengetahui jumlah saldo bank dan akan dicocokkan dengan saldo bank berdasarkan catatan staf akuntansi. Pengecekan dilakukan sewaktu-waktu oleh kasir.	1
	3. Terdapat pemisahan tugas dalam aktivitas pembiayaan.	3. a) Pembiayaan disetujui oleh komite atau dewan direksi melalui rapat komite, analisis sebelum melakukan pembiayaan seperti prospek usaha, laporan keuangan, dan lain-lain dilakukan oleh VCO, dan penilaian jaminan dilakukan oleh staf legal. b) NPP (Nota Penurunan Pembiayaan) dan PPD (Permohonan Pencairan Dana) dibuat oleh VCO dan kasir yang mengeluarkan dana kepada PPU. c) Staf administrasi investasi mengelola rekening PPU dan kasir yang bertugas menerima pembayaran baik dalam bentuk bilyet giro, transfer, maupun tunai.	1
	4. Catatan akun kunci seperi bank dan piutang usaha direkonsiliasi secara rutin.	4. Staf akuntansi melakukan rekonsiliasi bank setiap akhir bulan. Selain itu, dilakukan rekonsiliasi saldo piutang dengan data akun PPU dan daftar pembayaran dari PPU	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Aktivitas Pengendalian	5. Terdapat pembatasan akses ke sumber daya perusahaan.	<p>pada bagian staf administrasi investasi.</p> <p>5. a) Yang memiliki akses ke rekening bank perusahaan adalah kasir dan hal itu harus sepengetahuan kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan. Selain kasir dan kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan, pihak yang bisa menanyakan posisi dana perusahaan di bank adalah direksi. Jika ada pihak lain yang akan mengakses harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan.</p> <p>b) Dokumen resmi PPU seperti dokumen jaminan dan dokumen lain yang berhubungan dengan PPU disimpan dalam suatu ruangan anti api yang bernama ruang hasanah. Ruang hasanah hanya bisa diakses oleh kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan, staf administrasi, dan bagian legal. Kunci ruang hasanah dipegang oleh kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi dan keuangan dan kepala bagian legal sehingga jika staf administrasi mengakses ruangan hasanah pasti atas sepengetahuan dari kedua pihak tersebut.</p>	1
	6. Terdapat pertanggungjawaban atas tambahan dana pinjaman yang diberikan kepada debitur.	6. a) Setiap penambahan dana pinjaman yang diajukan PPU diperlakukan seperti pembiayaan baru. Dibatasi dokumen baru yang dibutuhkan dalam pemrosesan pembiayaan. VCO akan melakukan proses <i>due diligence</i> seperti pada awal pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah PPU benar-benar memerlukan tambahan pembiayaan.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Aktivitas Pengendalian		b) Untuk pencairan dana pembiayaan yang tidak dilakukan sekaligus (dilakukan lebih dari satu kali), pencairan dana yang kedua dan seterusnya hanya memerlukan PPD yang telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berwenang.	
	7. Terdapat auditor internal yang memiliki lingkup tanggung jawab yang tidak dibatasi oleh manajemen.	7. PT Sarana Jatim Ventura tidak memiliki auditor internal sehingga hasil pekerjaan bagian <i>accounting</i> dan bagian lainnya tidak diperiksa oleh auditor internal, hanya kepala bagian saja yang memeriksa pekerjaan para staf.	0
	8. Prosedur pembiayaan didokumentasikan dan diperbarui.	8. Prosedur pembiayaan didokumentasikan dalam tahapan pembiayaan dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Pembaruan prosedur yang pernah dilakukan adalah perubahan atas Pedoman Penilaian Kondisi Kesehatan PPU di mana dulu ada empat kategori kondisi kesehatan PPU dan sekarang ada lima kategori kondisi kesehatan PPU serta perubahan pada bobot penilaian.	1
	9. Aktivitas pengendalian yang dirancang untuk aktivitas pembiayaan cukup menggambarkan strategi pengurangan risiko manajemen.	9. a) Setiap PPU yang telah menerima dana dari kasir baik berupa tunai, cek, ataupun yang lain harus mengisi bukti pengakuan penerimaan yang bermaterai. Bukti tersebut harus diisi oleh semua PPU dengan jumlah pinjaman berapapun. b) PPD distempel " <i>PAID</i> " sebagai tanda bahwa pembiayaan kepada suatu PPU telah dilakukan.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Aktivitas Pengendalian	10. Dilakukan pengawasan kepada staf yang memiliki tugas terkait aktivitas pembiayaan.	<p>10. a) Kepala divisi investasi melakukan pengawasan atas pekerjaan VCO dengan cara <i>mereview</i>/meninjau seluruh hasil pekerjaan VCO seperti proposal investasi/pembiayaan yang akan dirapatkan dalam komite, penyempurnaan proposal investasi/pembiayaan setelah diadakan rapat komite, dan lain-lain.</p> <p>b) Kepala bagian <i>accounting</i>, administrasi, dan keuangan melakukan pengawasan atas pekerjaan staf bawahannya dengan <i>mereview</i> seluruh hasil pekerjaan staf di bawahnya, seperti melakukan <i>review</i> atas rekonsiliasi untuk memastikan apakah rekonsiliasi yang dibuat sudah benar, <i>review</i> atas kondisi kesehatan PPU yang ditetapkan staf administrasi untuk menentukan apakah kondisi kesehatan suatu PPU memang tepat.</p>	1
	11. Terdapat pembatasan untuk personil yang mengakses keseluruhan modul aplikasi komputer.	11. Setiap data pada komputer hanya bisa diakses oleh pihak yang membuat/menginputnya karena untuk mengakses data apapun diperlukan " <i>id</i> " dan " <i>password</i> " dari pihak yang menginput data. Jadi staf <i>accounting</i> hanya bisa mengakses data akuntansi yang dia buat, dia tidak bisa mengakses data PPU yang dibuat staf administrasi investasi. Jika ada pihak lain yang ingin mengakses harus ada otorisasi dari pihak yang menginput data tersebut.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
	12. Terdapat prosedur pengamanan dalam mengakses data master debitur.	12. Setiap data PPU disimpan secara terkomputerisasi oleh staf administrasi investasi. Data tersebut hanya bisa diakses oleh staf administrasi investasi karena untuk mengaksesnya diperlukan “ <i>id</i> ” dan “ <i>password</i> ” dari pihak yang menginput/membuat data.	1
Informasi dan Komunikasi	1. Kriteria untuk mengevaluasi kondisi debitur setelah pembiayaan diberikan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang.	1. Dalam evaluasi kondisi PPU ada dua aspek yang dinilai yaitu aspek kualitatif dan kuantitatif. Poin-poin di setiap aspek diberitahukan kepada pihak yang berwenang yaitu staf administrasi investasi sebagai pembuat laporan kondisi kesehatan PPU, VCO sebagai penilai aspek kualitatif, dan kepala bagian <i>accounting</i> , administrasi, dan keuangan sebagai evaluator laporan kesehatan PPU. Hal tersebut sesuai dengan pedoman penilaian kondisi kesehatan PPU yang telah ditetapkan.	1
	2. Karyawan terkait aktivitas pembiayaan memahami tanggung jawabnya.	2. VCO dan staf bagian <i>accounting</i> , administrasi, dan keuangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi jabatan yang telah ditetapkan. Staf bagian <i>accounting</i> , administrasi, dan keuangan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya melalui <i>job description</i> dan pemberian pemahaman oleh kepala bagian <i>accounting</i> , administrasi dan keuangan, dan VCO mengetahui tugas dan tanggung jawabnya melalui <i>job description</i> dan pemberian pemahaman oleh kepala divisi investasi.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Informasi dan Komunikasi	3. Informasi yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan diketahui oleh seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas pembiayaan.	<p>3. a) Seluruh data dan informasi mengenai PPU pada awal sebelum dilakukan pembiayaan diketahui oleh seluruh petugas yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan melalui NPP dan PPD yang akan dipresentasikan pada rapat komite yang dimana akan dijelaskan mengenai laporan keuangan PPU, prospek usaha, kondisi PPU saat ini, kondisi jaminan, dan lain-lain.</p> <p>b) Jika ada kebijakan/peraturan baru, manajemen melakukan sosialisasi kepada karyawan dengan cara pemberitahuan melalui memo maupun pelatihan bagi kebijakan yang memerlukan pelatihan khusus. Seperti pembaruan atas penilaian kondisi kesehatan yang memerlukan penghitungan yang cukup rumit diadakan pelatihan bagi staf administrasi agar tidak kesulitan dalam menerapkan penilaian yang baru.</p>	1
	4. Keluhan dari debitur diselesaikan dengan tepat.	4. Keluhan dari PPU diterima dan diatasi oleh bagian keuangan yaitu kasir baik secara langsung maupun melalui media telepon. Masalah yang biasanya timbul adalah keluhan PPU mengenai telatnya penurunan dana. Keluhan PPU akan langsung ditangani kasir dengan cara menjelaskan penyebab keterlambatan dan kepastian atas pencairan dana.	1

Ke halaman berikutnya

Komponen Pengendalian	Kriteria untuk <i>Rating</i> 1	Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura	<i>Rating</i>
Pengawasan	1. Terdapat evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dan independen atas aktivitas pengendalian terkait aktivitas pembiayaan yang dilakukan.	1. Auditor eksternal melakukan evaluasi rutin atas kinerja perusahaan hanya sebatas laporan keuangan. Evaluasi pengendalian internal terkait aktivitas pembiayaan tidak dilakukan secara rutin/terus-menerus oleh auditor eksternal. Hal tersebut dilakukan jika ada permintaan dari manajemen untuk melakukan evaluasi pengendalian internal.	0
	2. Terdapat peninjauan secara internal atas penerapan aktivitas pembiayaan.	2. Peninjauan secara internal atas penerapan aktivitas pembiayaan dilakukan oleh auditor internal BPUI. Auditor internal BPUI memastikan apakah pembiayaan telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin.	1

Sumber : Data yang diolah, 2011.

Ke halaman berikutnya

Hasil analisis pada tabel 4.1 mengenai struktur pengendalian internal pembiayaan ventura PT Sarana Jatim Ventura dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 4.2 Ringkasan Analisis Struktur Pengendalian Internal Pembiayaan Ventura PT Sarana Jatim Ventura

Komponen Pengendalian	Jumlah Kriteria Struktur Pengendalian Internal yang Memadai	Jumlah Kriteria Struktur Pengendalian Internal yang Terpenuhi	Jumlah Kriteria Struktur Pengendalian Internal yang Tidak Terpenuhi	Prosentase Kriteria Struktur Pengendalian Internal yang Memadai (%)	Prosentase Kriteria Struktur Pengendalian Internal yang Tidak Memadai (%)
Lingkungan Pengendalian	6	6	0	100	0
Penaksiran Risiko	3	2	1	66,67	33,33
Aktivitas Pengendalian	12	11	1	91,67	8,33
Informasi dan Komunikasi	4	4	0	100	0
Pengawasan	2	1	1	50	50
Secara Keseluruhan	27	24	3	88,89	11,11

Sumber : Data yang diolah, 2011.

Ke halaman berikutnya

4.2.1. Struktur Pengendalian Internal

4.2.1.1. Lingkungan Pengendalian

Secara umum lingkungan pengendalian SJV telah memadai. Enam kriteria struktur pengendalian internal yang memadai untuk komponen lingkungan pengendalian telah terpenuhi. Manajemen telah menegaskan pentingnya nilai etika dan integritas kepada seluruh anggota organisasi dengan cara menentukan kode etik atau peraturan perilaku yang didokumentasikan dalam bentuk buku yang bernama peraturan perusahaan yang diberikan dan disosialisasikan kepada setiap karyawan. Dengan begitu karyawan akan mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nilai-nilai etika tercermin pada setiap karyawan SJV. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya pelanggaran etika yang minimal. Berdasarkan hasil wawancara, pelanggaran etika yang pernah terjadi adalah kecurangan yang dilakukan oleh staf legal. Staf legal melakukan persekongkolan dengan PPU terkait laporan kondisi jaminan untuk tujuan pribadi staf legal. Hal tersebut hanya terjadi satu kali dan pihak manajemen langsung memberikan sanksi dengan memberhentikan staf legal dari pekerjaannya. Keterangan mengenai pelanggaran, sanksi, dan kewenangan dalam menjatuhkan hukuman/sanksi telah disebutkan dalam peraturan perusahaan. Hal tersebut akan memudahkan dalam penyelesaian pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Selain itu hal tersebut membuat karyawan mengetahui konsekuensi yang dihadapi jika mereka melakukan pelanggaran, sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu pelanggaran.

Kompetensi dan kualitas setiap karyawan merupakan fokus dari SJV terutama kompetensi dan kualitas karyawan terkait aktivitas pembiayaan. Manajemen melakukan pelatihan untuk para staf divisi investasi dalam bentuk seminar mengenai kelayakan usaha, kelayakan jaminan, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian *accounting*, administrasi dan keuangan pelatihan dilakukan dalam bentuk kursus seperti brevet dan seminar-seminar yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Tingkat pendidikan para staf terkait aktivitas pembiayaan telah sesuai dengan jabatan dan tugasnya di mana tingkat pendidikan staf administrasi investasi S1 akuntansi, staf *accounting* S1 akuntansi, kasir S1 manajemen, dan para VCO S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 IESP. Namun tidak ada kebijakan perekrutan karyawan secara tertulis yang memuat tentang ketentuan tingkat pendidikan karyawan dan kualifikasi yang tepat untuk suatu posisi sesuai dengan deskripsi jabatan. Hal tersebut akan mempersulit proses perekrutan dalam menentukan individu yang layak pada suatu posisi/jabatan.

Dewan komisaris SJV berasal dari pihak yang independen dari manajemen SJV. Dewan komisaris SJV berasal dari BAV dan BPUI. Dengan begitu, pengawasan atas pengelolaan perusahaan terutama terkait dengan aktivitas pemberian pembiayaan yang merupakan fungsi dewan komisaris dapat berjalan dengan baik.

Filosofi Sarana Jatim Ventura tercermin pada visi dan misi yang mereka miliki. Dari visi dan misi tersebut karyawan dapat memperkirakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak seharusnya dilakukan agar visi dan misi tersebut tercapai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa

gaya operasi SJV cenderung desentralisasi di mana perencanaan dan pengendalian terhadap unit kerja masing-masing divisi terletak pada manajemen menengah ke bawah, sedangkan untuk pembuat kebijakan dilakukan oleh dewan komisaris.

Sarana Jatim Ventura memiliki struktur organisasi yang cukup menggambarkan rantai perintah dan garis pertanggungjawaban secara jelas. Dalam prakteknya, penetapan pembagian wewenang dan tanggung jawab diwujudkan dalam *job description* yang berisi uraian tugas secara tertulis untuk masing-masing karyawan. Dengan adanya struktur organisasi dan *job description*, karyawan terkait pembiayaan dapat mengetahui tugas apa saja yang harus diselesaikan serta mengetahui jalur otoritas dalam aktivitas pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa fungsi SPI dan Tim R&D IT *Development* tidak berjalan. Dengan tidak adanya SPI, dikhawatirkan peninjauan dan pengawasan atas pengendalian pada prosedur pembiayaan sedikit longgar meskipun ada auditor internal dari BPUI yang melakukan tugas tersebut, karena hal itu tidak dilakukan secara rutin.

Penetapan wewenang dan tanggung jawab para karyawan SJV didokumentasikan dalam *job description* yang berisi uraian pekerjaan, tujuan pekerjaan, dan pelaporan kepada atasan. Masing-masing karyawan SJV harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para kepala bagian terutama kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan dan kepala divisi investasi yang terkait aktivitas pembiayaan melakukan pemeriksaan atas setiap hasil pekerjaan staf bawahannya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan

atau data yang dikerjakan bawahannya. Hasil pekerjaan atau data dari para staf harus dipastikan telah benar sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan tidak mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pembiayaan.

Aspek paling penting dari struktur pengendalian internal adalah personil/karyawan karena mereka yang melaksanakan struktur pengendalian internal. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan sumber daya manusia yang memadai sangat diperlukan untuk menghasilkan personil/karyawan yang kompeten dan terpercaya. Sarana Jatim Ventura telah memiliki kebijakan sumber daya manusia secara tertulis yang mengatur tentang perekrutan, pelatihan, promosi karyawan, tunjangan, dan pengupahan. Kebijakan sumber daya manusia perusahaan *direview* dan diperbarui apabila dianggap perlu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kurang lebih lima tahun sekali. Dengan adanya kebijakan sumber daya manusia yang memadai tersebut diharapkan setiap karyawan SJV memiliki kompetensi yang diperlukan.

4.2.1.2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko pada Sarana Jatim Ventura belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut disebabkan dari tiga kriteria struktur pengendalian internal yang memadai untuk komponen penaksiran risiko, terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi atau dengan kata lain 33,33% penaksiran risiko tidak memadai seperti yang tampak pada tabel 4.2 halaman 76.

Untuk memperoleh penaksiran risiko yang memadai, perlu dilakukan identifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Manajemen SJV

mengidentifikasi risiko atas aktivitas pembiayaan dengan cara melakukan analisis sebelum melakukan pembiayaan kepada CPPU. Analisis dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan kepada CPPU untuk memperoleh informasi yang tepat dan benar apa adanya terkait aspek legalitas CPPU, perencanaan PPU, produktivitas PPU, kondisi keuangan PPU, dan kondisi jaminan. Selain itu dilakukan analisis dokumentasi seperti dokumen jaminan, legalitas/yuridis PPU dan laporan keuangan/catatan keuangan sederhana PPU. Dengan adanya analisis sebelum pembiayaan dilakukan, SJV dapat mengetahui risiko apa saja yang ditanggungnya atas pembiayaan kepada suatu PPU.

Kriteria struktur pengendalian internal yang memadai yang tidak terpenuhi adalah mengenai kemampuan seluruh mekanisme pembiayaan yang dilakukan dalam mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Dalam praktiknya SJV melakukan pengawasan atas kondisi PPU setelah pembiayaan diberikan dengan membuat laporan kesehatan bagi masing-masing PPU setiap bulan. Dengan adanya laporan kesehatan, SJV dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet). Perhatian lebih mendalam akan diperlakukan kepada PPU yang mulai tergolong dalam perhatian khusus sehingga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasi. Selain itu terdapat praktik prosedur pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peninjauan lapangan dalam tahap pengawasan tidak diterapkan sesuai dengan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan di mana menurut prosedur pembiayaan “*monitoring*” wajib dilakukan oleh SJV secara terus-menerus sejak dilakukan pencairan dana dan

selama masa investasi sampai dengan divestasi selesai”, sedangkan pada praktiknya *monitoring* dalam bentuk peninjauan lapangan tersebut tidak dilakukan secara rutin dan tidak dilakukan kepada semua PPU. Tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut dilakukan karena keterbatasan SJV dalam SDM (Sumber Daya Manusia). Berdasarkan hasil wawancara diketahui jumlah VCO saat ini adalah lima orang sedangkan jumlah PPU sekitar 400 orang. Hal ini menyebabkan SJV tidak dapat mengetahui kondisi masing-masing PPU secara pasti.

4.2.1.3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian PT Sarana Jatim Ventura belum sepenuhnya memadai. Dari 12 kriteria ada satu kriteria struktur pengendalian internal yang memadai yang tidak terpenuhi. Bisa dikatakan bahwa 8,33% aktivitas pengendalian tidak memadai seperti yang tampak pada tabel 4.2 halaman 76.

Pada proses persetujuan dan pencairan pembiayaan, telah dilakukan otorisasi yang memadai oleh pejabat yang berwenang terhadap keputusan pemberian dan pencairan pembiayaan. Untuk pembiayaan lebih dari 500 juta, diperlukan otorisasi khusus oleh satu orang komisaris. Sedangkan untuk pembiayaan lebih dari satu milyar, diperlukan otorisasi khusus oleh dua orang komisaris (baik ketua maupun anggota namun yang diutamakan adalah pemegang saham terbesar yaitu BAV).

Pemisahan tugas pada proses pembiayaan SJV telah berjalan dengan baik. Analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, dan pengelolaan rekening PPU dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda. pembiayaan

disetujui oleh komite atau dewan direksi, NPP (Nota Penurunan Pembiayaan) dan PPD (Permohonan Pencairan Dana) dibuat oleh VCO, kasir yang mengeluarkan dana kepada PPU, staf administrasi investasi mengelola rekening PPU, dan kasir yang bertugas menerima pembayaran. Dengan adanya pemisahan tugas yang baik, maka SJV dapat mencegah terjadinya pembiayaan yang semestinya tidak dilakukan, manipulasi jumlah pembiayaan yang diberikan, dan manipulasi jumlah pembayaran dari PPU.

Verifikasi pada proses pembiayaan telah dilakukan dengan baik. Saat tutup buku dilakukan verifikasi atas saldo akun pada laporan keuangan dengan bukti-bukti transaksi serta dilakukan pengecekan saldo ke bank yang kemudian dicocokkan dengan saldo bank berdasarkan catatan staf akuntansi. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa saldo akun pada laporan keuangan dan saldo bank telah tepat. Dengan adanya verifikasi, maka diperoleh data atau keterangan yang valid sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pembiayaan.

Rekonsiliasi perlu dilakukan untuk menjaga catatan di beberapa pihak yang saling berhubungan sama, seperti rekonsiliasi bank dan saldo piutang dengan data akun PPU dan daftar pembayaran dari PPU sehingga tidak menghasilkan data yang salah. Selain itu dengan adanya rekonsiliasi, apabila terjadi kecurangan dalam suatu transaksi yang berhubungan dengan akun bank dan piutang dapat teridentifikasi.

Pembatasan akses ke sumber daya perusahaan perlu dilakukan untuk menjaga keamanan sumber daya perusahaan. Pembatasan akses ke sumber daya

perusahaan telah dilakukan dengan baik oleh SJV, yang memiliki akses ke rekening bank perusahaan adalah direksi dan kasir dengan sepengetahuan kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan. Jika ada pihak lain yang akan mengakses harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan. Dokumen resmi PPU disimpan dalam suatu ruangan yang bernama ruang hasanah yang hanya bisa diakses oleh kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan, kepala bagian legal, dan staf administrasi investasi dengan sepengetahuan kedua kepala bagian tersebut. Selain itu setiap data PPU disimpan secara terkomputerisasi oleh staf administrasi investasi dan untuk mengaksesnya diperlukan “*id*” dan “*password*” dari staf administrasi investasi. Pembatasan akses juga dilakukan pada keseluruhan modul aplikasi komputer. Setiap data pada komputer hanya bisa diakses oleh pihak yang membuat/menginputnya dengan memasukkan “*id*” dan “*password*” dari pihak yang menginput/membuat data.

Terdapat pertanggungjawaban atas setiap tambahan dana pembiayaan kepada PPU baik berupa tambahan dana di luar perjanjian pembiayaan maupun tambahan dana yang diberikan kepada PPU sesuai dengan perjanjian yang ada (pencairan dana dilakukan lebih dari satu kali). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar setiap pencairan dana dilakukan untuk transaksi pembiayaan yang tepat.

SJV tidak memiliki auditor internal sendiri sehingga seluruh hasil pekerjaan bagian *accounting* dan bagian lainnya tidak diperiksa oleh pihak yang independen. Hal tersebut mengakibatkan kemungkinan terjadinya kecurangan

manipulasi data karena adanya kongkalikong oleh pihak-pihak dalam suatu bagian yang tidak terdeteksi.

Salah satu fungsi adanya aktivitas pengendalian adalah untuk mengurangi risiko. SJV telah merancang aktivitas pengendalian yang mampu mengurangi dan mencegah risiko manajemen. Aktivitas tersebut meliputi pengisian bukti pengakuan penerimaan yang bermaterai bagi PPU yang telah menerima dana dan stempel “PAID” pada PPD sebagai tanda bahwa pembiayaan kepada suatu PPU telah dilakukan. Kedua hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dana.

4.2.1.4. Informasi dan Komunikasi

Secara umum informasi dan komunikasi pada Sarana Jatim Ventura telah memadai. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya empat kriteria struktur pengendalian internal yang memadai untuk komponen informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang baik akan membuat karyawan memahami tanggung jawabnya dan pekerjaan akan terselesaikan dengan baik. Hal tersebut tercermin pada karyawan SJV terutama yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan. Staf pada bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan dan bagian investasi mengetahui tugas dan tanggung jawabnya melalui *job description* dan pemberian pemahaman oleh masing-masing kepala bagian. Informasi dan komunikasi yang baik tersebut membuat VCO dan staf pada bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi jabatan yang telah ditetapkan.

Informasi berupa poin-poin di setiap aspek kualitatif dan kuantitatif yang dinilai dalam rangka evaluasi kondisi PPU diberitahukan kepada staf administrasi investasi sebagai pembuat laporan kondisi kesehatan PPU, VCO sebagai penilai aspek kualitatif, dan kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan sebagai evaluator laporan kesehatan PPU. Hal tersebut akan mempermudah mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Setiap pihak yang terkait dalam aktivitas pembiayaan harus mengetahui semua informasi PPU yang diperlukan dalam proses pembiayaan agar keputusan yang diambil berkenaan dengan keputusan pembiayaan tepat. Seluruh data dan informasi mengenai PPU akan dipresentasikan pada rapat komite di mana akan dijelaskan mengenai laporan keuangan PPU, prospek usaha, kondisi PPU saat ini, kondisi jaminan, dan lain-lain.

Kebijakan pembiayaan menguraikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan sehingga penting bagi para karyawan yang terkait aktivitas pembiayaan untuk mengetahuinya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa manajemen memberitahukan kepada karyawan apabila ada pembaruan atas kebijakan perusahaan terutama kebijakan pembiayaan melalui memo maupun pelatihan. Pelatihan dilakukan bagi kebijakan yang memerlukan pelatihan khusus. Seperti pada pembaruan atas penilaian kondisi kesehatan, di mana diperlukan penghitungan yang cukup rumit sehingga diadakan pelatihan bagi staf administrasi agar tidak kesulitan dalam menerapkan penilaian yang baru.

Informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal juga diperlukan oleh suatu perusahaan. PPU merupakan salah satu pihak eksternal SJV. Keluhan dari

PPU bisa menjadi informasi masukan bagi SJV untuk meningkatkan pelayanannya sehingga kinerja SJV akan lebih baik. Keluhan dari PPU diterima dan diatasi oleh bagian keuangan yaitu kasir baik secara langsung maupun melalui media telepon. Keluhan PPU bisa menjadi masalah yang besar jika SJV tidak mampu mengatasi dengan cara dan waktu yang tepat.

4.2.1.5. Pemantauan

Pemantauan pada PT Sarana Jatim Ventura belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut disebabkan dari dua kriteria struktur pengendalian internal yang memadai untuk komponen pemantauan, terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi atau dengan kata lain 50% pemantauan di SJV tidak memadai seperti yang tampak pada tabel 4.2 halaman 76.

Pemantauan pada SJV dilakukan dalam bentuk peninjauan dan pemeriksaan secara internal atas penerapan aktivitas pembiayaan. Peninjauan dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh auditor internal BPUI. Auditor internal BPUI memastikan apakah pembiayaan telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin misalnya setiap tahun, sehingga terjadi kelonggaran dalam pengawasan kepatuhan penerapan struktur pengendalian internal pembiayaan terhadap kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam hal penerapan kebijakan pembiayaan yang tidak terdeteksi oleh pengawasan atas kinerja para staf yang hanya dilakukan oleh masing-masing kepala bagian.

Pemantauan dari pihak eksternal dalam bentuk evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dan independen atas aktivitas pengendalian terkait aktivitas

pembiayaan tidak dilakukan. Pihak eksternal yang dimaksud di sini adalah auditor eksternal, di mana evaluasi rutin atas kinerja perusahaan hanya dilakukan sebatas laporan keuangan. Evaluasi pengendalian internal terkait aktivitas pembiayaan tidak dilakukan secara rutin/terus-menerus oleh auditor eksternal. Evaluasi pengendalian dilakukan jika ada permintaan dari manajemen untuk melakukan evaluasi pengendalian internal. Hal tersebut mengakibatkan SJV tidak akan mengetahui jika terdapat kelemahan pada struktur pengendalian internal pembiayaan, sehingga tindakan korektif tentu saja tidak bisa dilakukan. Hal tersebut akan merugikan SJV karena kemungkinan terdapat kelemahan struktur pengendalian internal yang dapat mengakibatkan risiko yang signifikan bagi SJV.

4.2.2. *Non Performing Finance*

Perusahaan yang memiliki struktur pengendalian internal pemberian yang memadai akan mampu menekan nilai *non performing finance* (*non performing loan* jika pada bank). NPF atau tingkat pembiayaan bermasalah meliputi kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF dapat diketahui dari laporan kondisi kesehatan PPU yang dibuat staf administrasi SJV setiap bulan. NPF yang ada pada SJV merupakan jumlah prosentasi atas pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah data mengenai NPF Sarana Jatim Ventura pada periode januari 2011 hingga april 2011.

Tabel 4.3
Tingkat Bermasalah (*Non Performing Finance*)
PT Sarana Jatim Ventura
Januari 2011-April 2011

Kondisi Kesehatan PPU	Januari 2011 (%)	Februari 2011 (%)	Maret 2011 (%)	April 2011 (%)
Sehat	85,76	82,58	82,68	87,26
Dalam perhatian khusus	7,66	10,91	11,45	7,65
Kurang lancar	1,13	1,23	0,95	0,82
Diragukan	1,79	1,75	1,56	0,96
Macet	3,66	3,53	3,36	3,31
NPF	6,58	6,51	5,87	5,09
Target maksimal NPF	5	5	5	5

Sumber : Laporan Kondisi Kesehatan PPU PT Sarana Jatim Ventura Januari 2011-April 2011

Dari tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa antara Januari 2011 hingga April 2011 nilai NPF mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur pengendalian internal pembiayaan Sarana Jatim Ventura yang cukup memadai mampu menekan nilai NPF sehingga pelunasan pembiayaan lebih optimal. Namun nilai NPF masih tergolong besar karena berada di atas target maksimal NPF perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, SJV menetapkan 5% sebagai tingkat maksimal NPF. Jika NPF di atas 5% maka dianggap pembiayaan yang diberikan sangat bermasalah.

Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada SJV disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari pihak PPU seperti penurunan *cash flow* PPU akibat besarnya tunggakan pembayaran dari pelanggan PPU, manajemen PPU yang jelek di mana pada awal-awal pemberian pembiayaan pembayaran PPU lancar namun tiba-tiba menjadi buruk (sering menunggak), dan prospek usaha PPU yang menurun.

Untuk faktor penurunan *cash flow* akibat pihak ketiga dan penurunan prospek usaha PPU di pasaran, SJV tidak dapat mengantisipasi faktor tersebut. Namun untuk manajemen PPU yang buruk, SJV seharusnya dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan peninjauan lapangan dan komunikasi yang lebih intens dengan PPU terkait usaha yang dijalankan PPU sehingga PPU dapat meningkatkan kualitas manajemen usahanya. Hal tersebut terjadi karena kelemahan Sarana Jatim Ventura dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pembiayaan PPU.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai struktur pengendalian internal pembiayaan ventura yang telah diterapkan oleh PT Sarana Jatim Ventura dapat diberikan simpulan sebagai berikut :

1. Struktur pengendalian internal pembiayaan ventura yang diterapkan oleh PT Sarana Jatim Ventura cukup memadai dengan tingkat pemenuhan atas kriteria struktur pengendalian internal yang memadai secara keseluruhan sebesar 88,89% dengan rincian lingkungan pengendalian sebesar 100%; penaksiran risiko sebesar 66,67%; aktivitas pengendalian sebesar 91,67%; informasi dan komunikasi sebesar 100%; pemantauan sebesar 50%.

Dari 27 kriteria struktur pengendalian internal yang telah ditetapkan, hanya tiga kriteria yang tidak terpenuhi yaitu mekanisme pembiayaan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat mengurangi risiko tidak terlunasinya pembiayaan yang mungkin terjadi, tidak terdapat auditor internal yang memiliki lingkup tanggung jawab yang tidak dibatasi oleh manajemen, dan tidak terdapat evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dan independen atas aktivitas pengendalian terkait aktivitas pembiayaan yang dilakukan.

Tidak terpenuhinya kriteria tersebut dikarenakan pengawasan dalam bentuk peninjauan lapangan tidak dilakukan kepada seluruh PPU dan tidak dilakukan secara rutin karena jumlah VCO yang terbatas, auditor internal ada di induk perusahaan sehingga hasil pekerjaan setiap bagian tidak diperiksa oleh auditor internal, dan auditor eksternal SJV melakukan evaluasi rutin atas kinerja perusahaan hanya sebatas laporan keuangan.

2. Struktur pengendalian internal pembiayaan ventura PT Sarana Jatim Ventura yang cukup memadai mampu menekan nilai *Non Performing Finance* (tingkat pembiayaan bermasalah). Hal ini terbukti dengan terjadinya penurunan nilai NPF sejak bulan Januari 2011-April 2011. Namun angka NPF relatif cukup tinggi, melebihi target maksimal NPF yaitu 5% dan penurunan NPF secara keseluruhan tidak hanya disebabkan oleh struktur pengendalian internal pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura yang cukup memadai karena terdapat faktor lain sebagai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah selain masalah struktur pengendalian internal pembiayaan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan di atas, peneliti mengajukan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Sarana Jatim Ventura yaitu sebaiknya dilakukan peningkatan kualitas struktur pengendalian internal pembiayaan agar target nilai NPF maksimal perusahaan dapat tercapai. Peningkatan kualitas struktur pengendalian internal pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara meliputi :

1. Melakukan perekrutan VCO untuk mengatasi keterbatasan jumlah VCO. Selain itu untuk mengurangi risiko tidak terlunasnya pembiayaan yang mungkin terjadi, perusahaan sebaiknya mewajibkan seluruh PPU melaporkan laporan keuangan atau catatan keuangan sederhana bagi PPU yang tidak membuat laporan keuangan kepada SJV. Dari laporan keuangan tersebut paling tidak kemampuan membayar PPU dapat diketahui dari kondisi operasional PPU yang tercermin pada laporan keuangan dan catatan keuangan PPU.
2. Fungsi auditor internal pada SJV dijalankan sehingga ada pihak independen yang dapat memeriksa hasil pekerjaan seluruh bagian.
3. Dilakukan evaluasi atas struktur pengendalian internal pembiayaan SJV secara periodik oleh auditor eksternal. Selain mengidentifikasi kelemahan atas struktur pengendalian internal, pemeriksaan atas aktivitas pembiayaan juga perlu dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengetahui apakah tidak ada kecurangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amudo, Angella & Eno L Inanga. 2009. *Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda*, (Online), (<http://www.eurojournals.com/finance.htm>, diakses 3 Maret 2011).
- Anonim. 2009. *Kasus Kredit Fiktif Bandar Lampung: Bos Tripanca Group Divonis 5,6 Tahun Penjara*, (Online), (<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=2617&l=kasus-kredit-fiktif-bandar-lampung-bos-tripanca-group-divonis-56-tahun-penjara.html>, diakses 20 Maret 2011).
- , 2009. *Penyebab Utama Kegagalan dalam Bisnis*, (Online), (<http://programukm.blogspot.com/2009/12/penyebab-utama-kegagalan-dalam-bisnis.html>, diakses 4 Maret 2011).
- , Tanpa Tahun. *Profil Sarana Jatim Ventura*, (Online), (<http://jatimventura.6te.net/index.php/perseroan.html>, diakses 7 Desember 2010).
- Bagraff, Riza Achmad. 2006. *Evaluasi Pengendalian Intern Atas Prosedur Pembiayaan Bagi Hasil Al-Mudharabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Bodnar, George H dan William S Hopwood. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Terjemahan oleh Julianto Agung Saputra & Lilis Setiawati. 2006. Yogyakarta: ANDI.
- Boynton, William C. dan Raymond N. Johnson. 2006. *Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting*. Eighth Edition. United States of America: John Wiley and Sons, Inc.
- Darrusman. 2009. *Kronologi Kasus BPR Tripanca Setiadana Lampung Dan Kaitannya Dengan Etika Dunia Perbankan*, (Online), (<http://darrusman.blogspot.com/2009/04/kronologi-kasus-bpr-tripanca-setiadana.html>, diakses 18 Maret 2011).
- Hall, James A. Tanpa Tahun. *System Informasi Akuntansi*. Terjemahan oleh Dewi Fitriyani & Deny Arnos Kwary. 2007. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. 2009. *Manajemen Risiko*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeller, Robert R. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing A Common Body of Knowledge*. Seventh Edition. United States of America: John Wiley and Sons, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyantoko, A. 2005. *Melacak Skandal Perbankan*, (Online), (<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Melacak%20Skandal%20Perbankan-MI.htm>, diakses 7 Maret 2011).
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. Jakarta.
- . *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- . *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007*. Jakarta.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*. Jakarta.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2003. *Accounting Information System. Ninth Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutojo, Siswanto. 2007. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Tawaf, Tjukria P. 1999. *Audit Intern Bank Buku dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umam, Khotibul. 2010. *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Yin, Robert K. Tanpa Tahun. *Studi Kasus Desain & Metode*. Terjemahan oleh M Djauzi Mudzakir. 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuniarti, Ratih. 2009. *Peranan Struktur Pengendalian Intern terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada Bank 'X' Cabang Surabaya untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah*. Surabaya: Universitas Airlangga.



LAMPIRAN 1**Hasil Wawancara****Divisi Investasi****Kepala Divisi Investasi****Lingkungan Pengendalian**

1. P : Apakah pernah terjadi pelanggaran etika yang dilakukan karyawan bagian investasi? Jika ya, apa bentuk pelanggaran tersebut dan siapa yang melakukannya? Bagaimana frekuensi terjadinya pelanggaran tersebut?

N : Tidak. Namun kecurangan yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan pernah terjadi. Kecurangan tersebut dilakukan oleh staf legal. Staf legal melaporkan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada informasi yang disembunyikan mengenai jaminan PPU, jaminan PPU dikatakan layak oleh staf legal namun pada kenyataannya tidak dan hal tersebut memang disengaja karena adanya kepentingan pribadi dari staf legal. Namun hal tersebut tidak sering terjadi hanya sekali saja.

2. P : Bagaimana latar belakang/tingkat pendidikan para VCO? Apakah latar belakang/tingkat pendidikan karyawan sesuai dengan dengan posisi atau tugas mereka masing-masing?

N : Tingkat pendidikan para VCO yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 IESP dan hal tersebut sesuai dengan tugas VCO.

3. P : Apakah struktur organisasi cukup mampu menggambarkan rantai perintah secara jelas pada bagian investasi?

N : Ya.

4. P : Apakah kepala divisi investasi menindak lanjuti tugas/tanggung jawab yang diberikan ke bawahannya? Jika ya, bagaimana bentuk *follow up* tersebut?

N : Ya. Kepala divisi investasi menindaklanjuti seluruh hasil pekerjaan VCO seperti proposal investasi/pembiayaan yang akan dirapatkan dalam komite, penyempurnaan proposal investasi/pembiayaan setelah diadakan rapat komite, dll. Seluruh data yang keluar dari bagian investasi pasti telah diperiksa dan

LAMPIRAN 1

disetujui oleh kepala divisi investasi karena seluruh data yang keluar dari bagian investasi harus sepengetahuan kepala divisi investasi.

Penaksiran Risiko

1. P : Apakah manajemen melakukan analisis terhadap CPPU sebelum pembiayaan yang diajukan disetujui? Jika ya, bagaimana analisis tersebut?

N : Ya, analisis dilakukan sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada CPPU baik analisis yuridis ataupun non yuridis. Untuk analisis yuridis bagi CPPU yang berbadan hukum, perorangan, maupun badan usaha meliputi analisis data CPPU, akta pendirian, akta perubahan, susunan pemegang saham, susunan pengurus, perijinan usaha, jaminan yang diberikan, dokumen perijinan jaminan, dokumen kependudukan, pengikatan pembiayaan, dan hubungan hukum dengan pihak lain. Analisis yuridis dilakukan oleh *legal officer (LO)*. Sedangkan untuk analisis non yuridis, meliputi analisis tentang usaha CPPU. VCO akan melakukan *due diligence* untuk melihat performa usaha CPPU. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat mutasi tabungan atau rekening koran atau juga bisa melihat nota penjualan, kemudian akan dilakukan konfirmasi ke *supplier* dan pelanggan atau bisa juga ke pihak *bowhir (pemberi kerja)* jika CPPU mendapatkan pekerjaan yang dibuktikan dengan dokumen berupa SPK (Surat Perintah Kerja) atau *Purchasing Order (PO)*.

Aktivitas Pengendalian

1. P : Bagaimana prosedur otorisasi atas persetujuan permohonan pembiayaan yang diajukan CPPU? Bagaimana prosedur otorisasi apabila terjadi permohonan tambahan pembiayaan yang diajukan CPPU ?

N : Rapat komite diadakan untuk menentukan apakah pembiayaan kepada suatu CPPU dapat dilakukan. Pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat dilakukan setelah adanya otorisasi dari dewan direksi atau komisaris. Untuk pemberian pembiayaan sampai dengan 500 juta otorisasi persetujuan oleh dewan direksi, untuk 500 juta sampai dengan 1 Milyar memerlukan otorisasi dari satu orang komisaris dari BAV (pemegang saham terbesar) dan lebih dari satu milyar

LAMPIRAN 1

memerlukan otorisasi minimal dua orang komisaris (baik ketua maupun anggota dewan komisaris namun yang diutamakan adalah pemegang saham terbesar yaitu BAV). Otorisasi ini berlaku baik untuk pengajuan pembiayaan baru ataupun atas tambahan fasilitas pembiayaan.

2. P : Apakah ada pemisahan tugas antara petugas yang melakukan persetujuan pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan dengan petugas yang menilai jaminan dari PPU yang mengajukan permohonan pembiayaan? Jika ya, siapa saja yang melakukan hal tersebut?

N : Ya. Pembiayaan disetujui oleh komite atau dewan direksi melalui rapat komite, analisis pembiayaan seperti prospek usaha, laporan keuangan, dll dilakukan oleh VCO sedangkan untuk penilaian jaminan dilakukan oleh staf legal.

3. P : Apakah ada pertanggung jawaban atas setiap penambahan dana pembiayaan yang diberikan kepada PPU? Jika ya, bagaimana bentuk pertanggung jawaban tersebut?

N : Ya. Setiap ada proses tambahan pembiayaan ke PPU akan diperlakukan seperti pembiayaan baru. VCO akan tetap melakukan proses *due diligence* seperti pada awal pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah PPU benar-benar memerlukan tambahan pembiayaan dan tujuan tambahan pembiayaan akan digunakan untuk modal kerja atau investasi. Proses *due diligence* ini perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pembiayaan.

4. P : Apakah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban oleh para VCO? Jika ya, bagaimana bentuk pengawasannya?

N : Ya. Kepala divisi investasi melakukan pengawasan atas operasional pemberian pembiayaan dengan cara meninjau seluruh hasil pekerjaan VCO seperti proposal investasi/pembiayaan yang akan dirapatkan dalam komite, penyempurnaan proposal investasi/pembiayaan setelah diadakan rapat komite, dll. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atas data/hasil yang mereka kerjakan dan seluruh data yang keluar dari bagian investasi harus sepengetahuan kepala bagian investasi.

LAMPIRAN 1**Informasi dan Komunikasi**

1. P : Apakah informasi mengenai PPU diketahui oleh seluruh petugas yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pembiayaan dan dewan direksi? Jika ya, informasi apa saja yang diketahui? Bagaimana mereka dapat mengetahui informasi tersebut?

N : Ya. Dalam rapat komite VCO akan menyampaikan/menjelaskan sesuai dengan proposal investasi/pembiayaan yang diajukan baik mengenai laporan keuangan PPU, prospek usaha, kondisi PPU saat ini, kondisi jaminan, dll. Yang mengikuti rapat komite adalah VCO, bagian legal, staf administrasi investasi, kepala divisi dan dewan direksi.

2. P : Apakah setiap karyawan memahami tanggung jawabnya? Jika ya, apa indikasi tentang pemahaman karyawan tersebut? Apa yang dilakukan agar karyawan memahami tanggung jawabnya tersebut?

N : Ya. Selama ini pekerjaan VCO sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, namun pasti pernah terjadi kesalahan kecil dan itu dapat diatasi dengan *review* yang dilakukan kepala divisi investasi. Pada awalnya setiap karyawan pasti sudah mengetahui tugasnya secara umum untuk tugas spesifiknya VCO mengetahui tugas dan tanggung jawabnya melalui informasi pada deskripsi jabatan perusahaan serta pemberian pemahaman dari kepala divisi investasi.

Pengawasan

1. P : Apakah terdapat evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus atas aktivitas pengendalian terkait aktivitas pemberian pembiayaan yang dilakukan? Jika ada apakah evaluasi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen?

N : Ya, auditor eksternal melakukan evaluasi rutin atas kinerja perusahaan namun hanya sebatas laporan keuangan saja. Untuk evaluasi pengendalian internal tidak dilakukan secara rutin oleh auditor eksternal. Hal tersebut dilakukan jika ada permintaan dari manajemen untuk melakukan evaluasi pengendalian internal.

LAMPIRAN 1

2. P : Apakah terdapat peninjauan secara internal atas penerapan aktivitas pemberian pembiayaan? Jika ya, bagaimana peninjauan dan evaluasi tersebut ?

N : Ya. Peninjauan internal dilakukan oleh auditor internal BPUI. Auditor internal BPUI melakukan peninjauan ke PT Sarana Jatim Ventura untuk memastikan apakah penyaluran pembiayaan telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui


WINDA CAHYONO
Kepala Divisi Investasi

PT SARANA
JATIM
VENTURA

LAMPIRAN 1**Venture Capital Officer (VCO)****Penaksiran Risiko**

1. P : Apakah manajemen melakukan analisis terhadap CPPU sebelum pembiayaan yang diajukan disetujui? Jika ya, bagaimana analisis tersebut?

N : Ya, perusahaan melakukan analisis sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada CPPU seperti analisis atas *existing and planning of production* meliputi bahan baku, produktivitas, dan pasar, analisis *existing and forecasting of financial* meliputi neraca, laporan laba rugi, dan rasio-rasio (*liquidity, leverage, and activity*), analisis *existing and planning of legal aspect* meliputi *legality* (konfirmasi, perjanjian, jaminan) dan *insurance (life, assets)* yang dilakukan VCO.

2. P : Apakah dilakukan analisis dokumentasi atas data dan informasi yang berhubungan dengan CPPU sebelum melakukan pemberian pembiayaan? Jika ya, dokumen apa saja yang dianalisis?

N : Ya. Beberapa analisis dokumentasi yang dilakukan adalah analisis dokumen jaminan, legalitas/yuridis CPPU (seperti akta pendirian CPPU) yang dilakukan staf legal dan analisis laporan keuangan CPPU yang dilakukan oleh VCO. Jika CPPU tidak memiliki atau membuat laporan keuangan, maka VCO akan menganalisis rekening koran dan catatan keuangan sederhana seperti daftar pemasukan, pengeluaran, catatan hutang, catatan piutang CPPU, dsb.

3. P : Apakah dilakukan peninjauan dan evaluasi atas aktivitas PPU setelah pembiayaan diberikan? Jika ya, bagaimana bentuk evaluasi tersebut? Apakah evaluasi tersebut dilakukan dengan rutin? Apakah evaluasi tersebut dilakukan kepada seluruh PPU?

N : Ya. VCO melakukan peninjauan lapangan kepada PPU setelah pembiayaan diberikan, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pemanfaatan pembiayaan yang dilakukan oleh PPU. Namun peninjauan dan evaluasi tersebut tidak dilakukan secara rutin dan dilakukan VCO hanya kepada PPU yang mulai ada indikasi bermasalah seperti keterlambatan pembayaran selama tiga bulan, terjadi penurunan prospek pada bidang usaha PPU, dll. Hal tersebut disebabkan keterbatasan dalam jumlah

LAMPIRAN 1

sumber daya manusia yaitu jumlah VCO yang hanya lima orang padahal jumlah PPU ada sekitar 400.

Informasi dan Komunikasi

1. P : Apakah ada kriteria untuk mengevaluasi kondisi PPU setelah pemberian kredit/pembiayaan diberikan? Jika ya, bagaimana kriteria dalam mengevaluasi kondisi PPU? Apakah hal tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang?

N : Ya. Ada dua aspek yang dinilai dalam evaluasi kondisi PPU setelah pembiayaan/kredit diberikan yaitu aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif dapat terhitung secara langsung oleh sistem melalui data yang diinput oleh staf administrasi investasi. Sedangkan untuk penilaian aspek kualitatif dilakukan oleh VCO dan hasilnya akan diserahkan kepada staf administrasi investasi untuk digabungkan dengan penilaian kuantitatif agar dihasilkan laporan kondisi kesehatan PPU. Aspek-aspek penilaian tersebut diberitahukan kepada VCO dan staf administrasi investasi serta dikomunikasikan pula kepada kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan sebagai evaluator hasil laporan kondisi kesehatan PPU.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui



**PT SARANA
JATIM
VENTURA**

Tri Agus Darmawan

Venture Capital Officer

LAMPIRAN 1**Hasil Wawancara****Divisi Operasional**

I. Bagian *Accounting*, Administrasi dan Keuangan

A. Kepala Bagian *Accounting*, Administrasi dan Keuangan**Lingkungan Pengendalian**

5. P : Apakah pernah terjadi pelanggaran etika oleh staf bagian *accounting*, administrasi dan keuangan? Jika ya, apa bentuk tindakan tersebut dan siapa yang melakukannya? Bagaimana frekuensi terjadinya tindakan tidak jujur tersebut?

N : Tidak pernah.

2. P : Bagaimana latar belakang/tingkat pendidikan para staf bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan? Apakah latar belakang/tingkat pendidikan karyawan sesuai dengan posisi atau tugas mereka?

N : Tingkat pendidikan staf administrasi investasi S1 Akuntansi, staf *accounting* S1 akuntansi, dan kasir S1 manajemen dan hal tersebut sesuai dengan tugas mereka.

3. P : Apakah struktur organisasi cukup mampu menggambarkan rantai perintah secara jelas pada bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan?

N : Ya.

4. P : Apakah kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan menindak lanjuti tugas/tanggung jawab yang diberikan ke bawahannya? Jika ya, bagaimana bentuk *follow up* tersebut?

N : Ya. Kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan menindaklanjuti seluruh hasil pekerjaan staf dibawahnya. Seluruh data yang keluar dari bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan harus diperiksa dan disetujui oleh kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan.

Aktivitas Pengendalian

1. P : Bagaimana prosedur otorisasi pencairan dana pemberian kredit kepada PPU? Bagaimana prosedur otorisasi pencairan dana tambahan yang diajukan PPU?

LAMPIRAN 1

N : Pencairan dana kredit dilakukan setelah adanya persetujuan dari dewan direksi atau komisaris melalui rapat komite atas pembiayaan/pemberian kredit yang akan diberikan kepada PPU. Setelah persetujuan dewan direksi atau komisaris, VCO akan membuat NPP (Nota Penurunan Pembiayaan) dan PPD (Permohonan Pencairan Dana). Pada form NPP dan PPD yang dibuat VCO diperlukan otorisasi dari beberapa pihak antara lain VCO sebagai pihak yang membuat, kepala bagian dan kepala divisi investasi sebagai pihak yang memeriksa, bagian legal sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan bahwa form tersebut telah *clear/jelas*, staf administrasi investasi dan kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan sebagai pihak yang menerima/membukukan form tersebut dan direksi sebagai pihak yang menyetujui atas form NPP dan PPD yang dibuat. Setelah itu baru dibuat bukti bank keluar dan cek oleh kasir yang memerlukan otorisasi dari kasir sebagai pihak yang membuat, kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan sebagai pihak yang memeriksa dan direksi sebagai pihak yang menyetujui. Saat ini cek ditanda tangani oleh dua pihak diantara dua orang direksi dan kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan.

2. P : Apakah penghapusan piutang tak tertagih atas kredit macet yang terjadi dilakukan melalui otorisasi direksi? Jika ya, bagaimana prosedur penghapusan piutang tak tertagih?

N : Ya. Piutang yang dihapuskan adalah piutang atas PPU yang kondisinya tidak memungkinkan untuk ditagih seperti prospek usahanya buruk. Pada awalnya VCO membuat daftar nama PPU yang akan dihapuskan piutangnya dalam bentuk internal memo. Internal memo tersebut mencakup alasan dari penghapusan piutang yang akan dilakukan dan keterangan lain yang diperlukan. Pekerjaan yang dilakukan VCO tersebut diperiksa oleh kepala bagian dan kepala divisi investasi. Kemudian diajukan pada rapat komite yang dihadiri oleh VCO, bagian legal, dan direksi. Setelah penghapusan piutang disetujui (hasil rapat komite ditandatangani oleh seluruh anggota rapat komite) dibuat surat keterangan ke komisaris untuk meminta persetujuan penghapusan piutang. Piutang akan dihapus setelah komisaris menyetujui penghapusan atas piutang tersebut.

LAMPIRAN 1

3. P : Bagaimana pemisahan tugas pada bagian yang melakukan pencairan dana pemberian kredit? Apakah ada pemisahan tugas antara petugas yang mengelola rekening PPU dengan petugas yang menerima pembayaran dari PPU? Jika ya, siapa yang melakukan tugas tersebut?

N : Dalam pencairan dana, dibuat NPP (Nota Penurunan Pembiayaan) dan PPD (Permohonan Pencairan Dana) yang dilakukan oleh VCO, kasir yang mengeluarkan dana/kredit kepada PPU berupa cek maupun tunai. Petugas yang mengelola rekening PPU adalah staf administrasi investasi. Staf administrasi investasi membukukan segala dokumen mengenai PPU dan mengetahui perkembangan kondisi/jumlah pembiayaan/kredit PPU. Sedangkan yang bertugas menerima pembayaran adalah kasir baik dalam bentuk bilyet giro, transfer, maupun tunai.

4. P : Apakah dilakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan? Jika ya, verifikasi apa saja yang dilakukan?

N : Ya. Saat tutup buku dilakukan verifikasi atas saldo akun pada laporan keuangan dengan bukti-bukti transaksi.

5. P : Apakah ada pengendalian atas akses ke rekening bank perusahaan? Jika ya, bagaimana bentuk pengendalian atas akses tersebut?

N : Ya, yang memiliki akses ke rekening bank adalah kasir dan hal itu harus sepengetahuan kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan. Selain mereka, pihak yang bisa menanyakan posisi dana perusahaan di bank adalah direksi. Apabila pihak lain yang akan mengakses misalnya karena kasir sakit maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan.

6. P : Apakah ada pertanggung jawaban atas setiap pencairan dana tambahan pinjaman yang diberikan kepada PPU? Jika ya, bagaimana bentuk pertanggung jawaban tersebut?

N : Ya. Setiap tambahan pembiayaan/pemberian kredit yang dilakukan harus melalui prosedur pembiayaan/pemberian kredit dari awal. Jadi tambahan dana pinjaman oleh PPU diperlakukan sebagai pembiayaan/pemberian kredit baru,

LAMPIRAN 1

dibuat NPP,PPD, dan perjanjian baru. Sedangkan untuk pencairan dana kredit yang dilakukan lebih dari satu kali, pencairan dana yang kedua dan seterusnya hanya memerlukan PPD yang telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berwenang.

7. P : Apakah prosedur pembiayaan/pemberian kredit didokumentasikan dan diperbarui?

N : Ya. Prosedur pembiayaan/pemberian kredit didokumentasikan dalam tahap pembiayaan dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti *up date* Pedoman Penilaian Kondisi Kesehatan PPU terkait kategori kondisi kesehatan dan bobot penilaian.

8. P : Apakah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing staf bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan? Jika ya, bagaimana bentuk pengawasannya?

N : Ya. Kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan melakukan pengawasan dalam bentuk *review* atas seluruh hasil pekerjaan staf di bawahnya, seperti *review* antara data pembayaran PPU dengan data piutang. Kedua data tersebut di rekonsiliasi oleh staf akuntansi dan kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan melakukan *review* atas rekonsiliasi tersebut untuk memastikan apakah rekonsiliasi yang dibuat sudah benar. Selain itu juga dilakukan *review* atas kondisi kesehatan PPU yang ditetapkan staf administrasi. Staf administrasi hanya bertugas mengelola segala data dan keterangan mengenai PPU termasuk yang menentukan kondisi kesehatan PPU. Untuk hasil kondisi kesehatan PPU, akan *direview* oleh kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan untuk menentukan apakah kondisi kesehatan suatu PPU memang tepat. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atas data/hasil yang mereka kerjakan.

9. P : Apakah ada pembatasan bagi karyawan bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan untuk mengakses keseluruhan sistem komputer? Jika ya, bagaimana bentuk pembatasan tersebut?

N :.Ya. Setiap staf bagian *accounting*, administrasi dan keuangan hanya bisa mengakses data yang diinputnya, jadi misalnya staf *accounting* hanya bisa mengakses data akuntansi yang dia buat tidak bisa mengakses data PPU yang

LAMPIRAN 1

dibuat staf administrasi investasi. Jika ada pihak lain yang ingin mengakses harus ada otorisasi dari pihak yang membuat/menginput data tersebut.

Informasi dan Komunikasi

3. P : Apakah informasi mengenai PPU diketahui oleh seluruh petugas yang berhubungan dengan kegiatan pemberian kredit dan dewan direksi? Jika ya, informasi apa saja yang diketahui? Bagaimana mereka dapat mengetahui informasi tersebut?

N : Ya. Seluruh petugas yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan/pemberian kredit pasti mengetahui data mengenai PPU. Data PPU ada pada NPP dan PPD. Selain itu dalam rapat komite yang dilakukan, seluruh hal mengenai PPU diberitahukan/dijelaskan baik laporan keuangan PPU, prospek usaha, kondisi PPU saat ini, kondisi jaminan, dll.

4. P : Apakah setiap karyawan bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan memahami tanggung jawabnya? Jika ya, apa indikasi tentang pemahaman karyawan tersebut? Apa yang dilakukan agar karyawan memahami tanggung jawabnya tersebut?

N : Ya, seluruh staf bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya masing-masing, jika terjadi kesalahan itu adalah kesalahan teknis misalnya kesalahan dalam penghitungan pokok dan bagi hasil atas pembiayaan yang dilakukan namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya *review* oleh kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan. Pada awalnya setiap karyawan pasti sudah mengetahui tugasnya secara umum, untuk detailnya mereka mengetahui tugas dan tanggung jawabnya melalui informasi pada deskripsi jabatan perusahaan serta pemberian pemahaman dari kepala bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan.

3. P : Apakah pernah terjadi perselisihan atau keluhan dari para PPU? Jika ya, apakah masalah tersebut diselesaikan dengan tepat waktu? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?

N : Ya. Masalah yang biasanya timbul adalah keluhan PPU mengenai telatnya penurunan dana. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh pemberitahuan yang mendadak atas dana yang harus cair. Sedangkan untuk menurunkan dana

LAMPIRAN 1

diperlukan otorisasi dewan direksi atau komisaris dan mereka kebetulan tidak ada di tempat jadi dana tidak bisa turun. Namun keluhan PPU dapat langsung diatasi dengan menjelaskan penyebab keterlambatan dan kepastian atas pencairan dana. Keluhan dari PPU diterima dan diatasi oleh bagian keuangan yaitu kasir.

Pengawasan

2. P : Apakah terdapat evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus atas aktivitas pengendalian terkait aktivitas pemberian kredit yang dilakukan? Jika ada apakah evaluasi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen?

N : Ya, auditor eksternal melakukan evaluasi rutin atas kinerja perusahaan namun hanya sebatas laporan keuangan saja. Untuk evaluasi secara menyeluruh seperti evaluasi pengendalian internal tidak dilakukan secara rutin oleh auditor eksternal. Hal tersebut dilakukan jika ada permintaan dari manajemen untuk melakukan evaluasi pengendalian internal.

3. P : Apakah terdapat peninjauan secara internal atas penerapan aktivitas pemberian kredit? Jika ya, bagaimana peninjauan dan evaluasi tersebut ?

N : Ya. Peninjauan secara internal atas penerapan aktivitas pemberian kredit dilakukan oleh auditor internal BPUI. Namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin. Auditor internal BPUI memastikan apakah pemberian kredit telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

LAMPIRAN 1

1. P : Apakah terdapat kredit bermasalah pada PT Sarana Jatim Ventura? Jika iya apa saja bentuk kredit bermasalah yang terjadi?
N : Ya. Bentuk kredit bermasalah yang pernah terjadi adalah penunggakan pembayaran dan kredit macet.
2. P : Apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sarana Jatim Ventura?
N : Kredit bermasalah yang terjadi di PT Sarana Jatim Ventura disebabkan oleh beberapa hal antara lain manajemen PPU yang buruk, iktikad PPU yang memang tidak baik dari awal, terjadi penurunan keuangan PPU karena pihak ketiga (konsumen PPU), dsb.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui



**PT SARANA
JATIM
VENTURA**

NOTUS ALIM FARDIANTO
Kepala Bagian *Accounting*, Administrasi, dan Keuangan

LAMPIRAN 1

B. Staf Akuntansi

Aktivitas Pengendalian

1. P : Apakah dilakukan rekonsiliasi secara rutin atas akun-akun kunci transaksi pemberian kredit? Jika iya bagaimana bentuk rekonsiliasi tersebut?

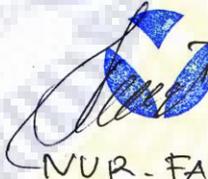
N : Ya. Staf akuntansi melakukan rekonsiliasi atas akun bank, saldo piutang dengan data akun PPU dan daftar pembayaran dari PPU pada bagian staf administrasi investasi.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui


PT SARANA
JATIM
VENTURA
NUR-FADRITAH
Staf Akuntansi

LAMPIRAN 1**C. Staf Administrasi Investasi****Penaksiran Risiko**

1. P : Apakah manajemen mengetahui kondisi PPU setelah kredit/pembiayaan diberikan kepada PPU? Jika ya, bagaimana manajemen mengetahui hal tersebut?

N : Ya. Setiap PPU memiliki laporan kesehatan dimana di dalamnya terdapat penilaian secara kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan kondisi kesehatan PPU.

2. P : Bagaimana evaluasi atas kondisi PPU setelah kredit/pembiayaan diberikan?

N : Setelah kredit/pembiayaan diberikan, masing-masing PPU akan dievaluasi kondisi kesehatannya. Kondisi kesehatan disini maksudnya, akan dinilai termasuk dalam kategori apa kondisi PPU. Perusahaan menetapkan lima kategori antara lain sehat, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kondisi kesehatan masing-masing PPU ditentukan dari hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif.

Aktivitas Pengendalian

1. P : Bagaimana penyimpanan data PPU? Apakah ada prosedur pengamanan atas pengaksesan data master PPU? Apakah ada pengamanan atas teknologi informasi dalam pengaksesan data master PPU? Jika ya, bagaimana prosedur pengamanan tersebut?

N : Segala data dan dokumen resmi mengenai PPU seperti jaminan, saldo pembiayaan/kredit PPU, dll disimpan oleh staf administrasi investasi. Untuk dokumen resmi mengenai PPU seperti dokumen jaminan dan dokumen lain yang berhubungan dengan PPU disimpan dalam suatu ruang anti api yang bernama ruang hasanah. Ruang hasanah hanya bisa diakses oleh kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan, staf administrasi investasi, dan bagian legal. Kunci ruang tersebut dipegang oleh kepala bagian *accounting*, administrasi dan keuangan dan kepala bagian legal sehingga jika staf administrasi mengakses ruangan tersebut pasti atas sepengetahuan dari kedua pihak tersebut. Untuk teknologi informasi setiap data PPU disimpan secara terkomputerisasi oleh staf administrasi investasi, dan yang bisa mengaksesnya

LAMPIRAN 1

hanya staf administrasi karena untuk mengaksesnya diperlukan “id” dan “password” dari pihak yang menginput/membuat data.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui



K. Indrasari

**PT SARANA
JATIM
VENTURA**

Staf Administrasi Investasi

LAMPIRAN 1

D. Kasir**Aktivitas Pengendalian**

1. P : Apakah ada bukti untuk setiap dana yang telah diberikan kepada PPU?
N : Ya. Setiap PPU yang telah menerima dana kredit/pembiayaan dari kasir baik berupa tunai, cek, ataupun yang lain harus mengisi bukti pengakuan penerimaan yang bermaterai. Bukti tersebut harus diisi oleh semua PPU dengan jumlah pinjaman berapapun.
2. P : Apakah ada tanda bagi pembiayaan/pemberian kredit yang telah dicairkan?
N : Ada. PPD akan distempel "PAID" sebagai tanda bahwa pembiayaan/pemberian kredit kepada suatu PPU telah dilakukan.
3. P : Apakah dilakukan verifikasi ke bank untuk memastikan saldo bank? Jika ya, kapan verifikasi tersebut dilakukan?
N : Ya. Verifikasi saldo ke bank dilakukan untuk mengetahui jumlah saldo bank yang kemudian akan dicocokkan dengan saldo bank berdasarkan catatan staf akuntansi. Pengecekan dilakukan sewaktu-waktu oleh kasir.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui

Aan Karulawati

 PT SARANA
 JATIM
 VENTURA

 Kasir

LAMPIRAN 1**II. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia****Lingkungan Pengendalian**

1. P : Apakah perusahaan memiliki peraturan perilaku secara tertulis? Apakah peraturan tersebut diketahui oleh seluruh anggota organisasi? Bagaimana mereka mengetahui peraturan tersebut?

N : Ya, perusahaan memiliki peraturan perilaku secara tertulis. Peraturan tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku yang bernama peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan berisi tentang peraturan etika, peraturan untuk cuti, peraturan tidak masuk kerja, dll. Peraturan tersebut diketahui oleh seluruh anggota organisasi. Mereka mengetahui peraturan tersebut dari buku peraturan perusahaan dan sosialisasi yang diberikan kepada seluruh anggota organisasi.

2. P : Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur sumber daya manusia mengenai perekrutan, pelatihan, pemberian kompensasi, dan promosi karyawan? Jika ya, apakah kebijakan dan prosedur tersebut didokumentasikan dan diperbarui? Kebijakan mengenai apa yang pernah diperbarui?

N : Ya, kebijakan mengenai sumber daya manusia perusahaan dibukukan dalam peraturan perusahaan yang juga ada kode etik untuk perusahaan. Kebijakan sumber daya manusia perusahaan ditinjau, diperbarui dan didaftarkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kurang lebih lima tahun sekali. juga diperbarui apabila dianggap perlu seiring dengan perkembangan perusahaan dan dunia usaha yang ada. Kebijakan SDM yang pernah diperbarui terkait tunjangan dan upah karyawan.

3. P : Apakah dilakukan pelatihan (*training*) kepada para karyawan divisi investasi dan accounting, administrasi, dan keuangan? Kapan pelatihan tersebut dilakukan?

N : Pelatihan yang dilakukan untuk para staf divisi investasi berbentuk seminar mengenai kelayakan usaha, kelayakan jaminan, dsb. Sedangkan untuk bagian *accounting*, administrasi dan keuangan meliputi kursus seperti brevet dan seminar-seminar yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Pelatihan dilakukan apabila dianggap perlu seperti saat terjadi perubahan kebijakan

LAMPIRAN 1

mengenai penilaian kondisi kesehatan PPU yang dulunya ada empat kategori sekarang ada lima kategori kondisi kesehatan.

4. P : Apakah dewan komisaris berasal dari pihak manajemen perusahaan? Siapa saja yang menjadi dewan komisaris?

N : Dewan komisaris berasal dari pihak pemegang saham yang merupakan pihak yang tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan. Dewan Komisaris PT Sarana Jatim ventura saat ini terdiri dari Bapak Ridwan Hisam sebagai Komisaris Utama yang merupakan wakil dari pemegang saham minoritas, Bapak Supomo sebagai anggota komisaris yang merupakan wakil dari BAV, dan Bapak Heri Sumaryadi sebagai anggota komisaris yang merupakan wakil dari BPUI.

Aktivitas Pengendalian

1. P : Apakah hasil pekerjaan bagian *accounting*, administrasi, dan keuangan dan bagian lainnya diperiksa oleh auditor internal?

N : Tidak. Hasil pekerjaan bagian *accounting* dan bagian lainnya tidak diperiksa oleh auditor internal hanya kepala bagian saja yang memeriksa pekerjaan para staf. Hal tersebut dikarenakan PT Sarana Jatim Ventura tidak memiliki auditor internal.

LAMPIRAN 1**Informasi dan Komunikasi**

1. P : Apakah seluruh karyawan mengetahui apabila ada peraturan baru mengenai operasional pembiayaan/pemberian kredit? Jika ya, bagaimana mereka dapat mengetahuinya?

N : Ya. Jika ada kebijakan/peraturan baru manajemen pasti melakukan sosialisasi kepada karyawan dengan cara pemberitahuan melalui memo maupun pelatihan bagi kebijakan yang memerlukan pelatihan khusus. Seperti untuk pembaharuan atas penilaian kondisi kesehatan yang memerlukan penghitungan yang cukup rumit diadakan pelatihan bagi staf administrasi agar tidak kesulitan dalam menerapkan penilaian yang baru.

Keterangan :

P = Penulis

N = Narasumber

Mengetahui



PT-SARANA
JATIM
VENTURA

ALFYAH NURHAYATI

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN 2**BASIC INFORMATION REPORT**

Nama Perusahaan	:	_____
Status	:	CPPU/PPU *)
Contact Person	:	_____
Alamat	:	_____
Bidang Usaha	:	_____
Lokasi Kunjungan	:	_____
Pihak PMVD	:	1. _____
	:	2. _____

CATATAN HASIL KUNJUNGAN**Stressing Point !**

1. Bidang Usaha
2. Kepemilikan Perusahaan
 - 2.1. Akte Pendirian
 - 2.2. Modal Dasar
 - 2.3. Modal Disetor
 - 2.4. Skema Kepemilikan Saham
3. Manajemen dan Direksi
 - 3.1. Struktur Organisasi
 - 3.2. Integritas Pengurus
 - 3.3. Pengalaman Pengurus
4. Sejarah Perusahaan
 - 4.1. Latar Belakang Pendirian
 - 4.2. Kondisi Sekarang
 - 4.3. Rencana Pengembangan
5. Operasional
 - 5.1. Kapasitas Produk Utama
 - 5.2. Fasilitas Produksi
 - 5.3. Distribusi Bahan Baku dan Penjualan
 - 5.4. Jumlah Tenaga Kerja dan Sistem Penggajian
 - 5.5. Rencana Pengembangan dan Kapasitas Produksi
6. Keuangan
 - 6.1. Neraca dan Laporan Laba Rugi, selama 3 (tiga) tahun terakhir
 - 6.2. Posisi Hutang, Bank, Jangka Waktu, Peruntukan, dan Beban Bunga
 - 6.3. Omset

Venture Capital Officer - 1	Venture Capital Officer - 2

LAMPIRAN 3**ANALISIS**

Nama Perusahaan	:	_____
Status	:	CPPU/PPU *)
Contact Person	:	_____
Alamat	:	_____
Bidang Usaha	:	_____

Stressing Point !

1. Existing and Planning of Production
 - 1.1. Raw Material
 - 1.2. Productivity
 - 1.3. Market
2. Existing and Forecasting of Financial
 - 2.1. Balance Sheet
 - 2.2. Profit and Loss
 - 2.3. Ratios (Liquidity, Leverage, and Activity)
3. Existing and Planning of Legal Aspect
 - 3.1. Legality
 - 3.1.1. Konfirmasi
 - 3.1.2. Perjanjian
 - 3.1.3. Jaminan
 - 3.2. Insurance
 - 3.2.1. Life
 - 3.2.2. Assets

LAMPIRAN 4**COMMITTEE APPROVAL**

To	: Investment Committee
From	: Internal Committee PT Sarana Jatim Ventura
Re	: Evaluation of Investment Proposal
Name of CPPU	: _____
Business Type	: _____
Scope of Business	: 1. _____
	2. _____
	3. _____

Committee Opinion :

Committee #1
Committee #2
Committee #3
Committee #4
Committee #5
Committee #6

Committee #1	Committee #2	Committee #3
Committee #4	Committee #5	Committee #6

LAMPIRAN 5**PROPOSAL INVESTASI**

Nama PPU	:	_____
Contact Person	:	_____
Alamat	:	_____
Telepon	:	_____
Bidang Usaha	:	_____

Stressing Point !

1. Latar Belakang Perusahaan
 - 1.1. Pendirian perusahaan
 - 1.2. Bidang usaha utama, serta usaha lain yang dijalankan
 - 1.2.1. Jenis produk
 - 1.2.2. Kapasitas produksi
 - 1.2.3. Omset
 - 1.2.4. Prospek
 - 1.2.5. Fasilitas produksi
2. Aspek Manajemen
 - 2.1. Integritas pengurus
 - 2.2. Latar belakang pendidikan dan pengalaman pengurus
 - 2.3. Susunan pemegang saham dan pengurus
3. Aspek Pemasaran
 - 3.1. Penjualan 3 (tiga) tahun terakhir
 - 3.2. Target dan orientasi pasar
 - 3.3. Market share yang ingin diraih
 - 3.4. Entry Barrier/Pesaing
 - 3.5. Sistem Distribusi
4. Aspek Keuangan
 - 4.1. Neraca 3 (tiga) tahun terakhir
 - 4.2. Laporan Laba Rugi 3 (tiga) tahun terakhir
 - 4.3. Kebutuhan dana
 - 4.4. Proyeksi :
 - 4.4.1. Cash Flow
 - 4.4.2. Laba Rugi
 - 4.4.3. Neraca
 - 4.4.4. Asumsi/Sensitivitas
 - 4.4.5. Analisis Keuangan (Rasio)
5. Aspek Resiko Usaha
 - 5.1. Hal-hal kritis yang dapat terjadi di intern perusahaan
 - 5.2. Penilaian hal kritis terhadap masa depan usaha
 - 5.3. Antisipasi
6. Ikhtisar dan Ketentuan Investasi
 - 6.1. Bentuk pendanaan
 - 6.2. Nilai pendanaan

LAMPIRAN 5

- 6.3. Jangka waktu
 - 6.4. Grace period
 - 6.5. Bentuk Imbal jasa
 - 6.6. Nilai angsuran pokok
 - 6.7. Nilai imbal jasa
 - 6.8. Manajemen fee
 - 6.9. Administrasion fee
 - 6.10. Agunan
7. Kesimpulan dan Opini VCO

Tanda tangan

1. Venture Capital Officer
2. Approval Direksi
3. Approval Komite Investasi (*khusus Jexim Scheme*).



LAMPIRAN 6**ANALISIS YURIDIS**

(Badan Hukum)

Data (Calon) Perusahaan Pasangan Usaha	
Nama Perusahaan	: _____
Alamat	: _____
Bidang Usaha	: _____

Akta Pendirian					
Nomer	Tanggal	Notaris	Tanggal/No. Pendaftaran Menkeh RI	Tanggal/No. Pendaftaran Depperindag	BNRI

Akta Perubahan					
Nomer	Tanggal	Notaris	Tanggal/No. Pendaftaran Menkeh RI	Tanggal/No. Pendaftaran Depperindag	BNRI

Susunan Pemegang Saham	
Nama Pemegang Saham	Nilai dan Prosentase Kepemilikan Saham

Susunan Pengurus	
Nama Pengurus	Jabatan

LAMPIRAN 6

Perijinan Usaha			
Jenis	Nomor Dokumen	Tanggal Jatuh Tempo	Dikeluarkan Oleh
NPWP			
SIUP			
TDP			
HO			

Jaminan Yang Diberikan					
No	Jenis	Lokasi	Dokumen (Jenis, Nomer, Masa Berlaku)	Nama Pemilik	Hubungan C/PPU Dengan Pemilik

Dokumen Perijinan Jaminan			
No	Jenis Perijinan	Nomer	Dikeluarkan Oleh

Subyek Hukum	
Nama	Jabatan

LAMPIRAN 6

Saran-saran Kelengkapan Dokumen
--

--

PENDAPAT/OPINI HUKUM

--

Approval	Legal Officer

LAMPIRAN 7**NOTA PENURUNAN PEMBIAYAAN**

Tanggal : No :
 Nama VCO :

Nama PPU	
Alamat/ Telepon	
Sumber Dana	
Penanggung jawab	
Jenis Pembiayaan	Reguler / Proyek / Diskonto / Lain-lain (.....)
Jumlah Pembiayaan	
Jangka Waktu	Tahun / Bulan (.....s/d)
Sifat Pembiayaan	
Bagi Hasil	Baru / Tambahan ke
Installment	

Biaya-biaya

Komitment/ Kesepakatan	
Administrasi & Keuangan	
Pembinaan Manajemen	

Jaminan**Nilai Jaminan****Catatan**

Dibuat	Diperiksa	Diketahui	Disetujui

Diterima Bag. Keuangan	Diterima Administrasi

PIRAN 8



PT SARANA JATIM VENTURA

Jl. Jemur Andayani No. 33 Surabaya 60237
Telp. (031) 8432333 Fax. (031) 8434333

**PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU)**

Surabaya,

Kepada Yang Terhormat
Direksi PT. Sarana Jatim Ventura

DATA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (Diisi oleh VCO)	
No. PPU	
Nama PPU	
Alamat	
Jenis Pembiayaan	Jexim / Regular / Lain (.....)
Plafond pembiayaan PT. Sarana Jatim Ventura	
Tujuan Pembiayaan sesuai jadwal :	
- Investasi (Jelaskan)	
- Modal kerja (Jelaskan)	
- Pengambilalihan pinjaman pihak lain (Jelaskan)	
- Lain-lain (Jelaskan)	
EVALUASI PENGGUNAAN DANA (Diisi oleh VCO)	
Jumlah permintaan dana oleh PPU	
Tujuan permintaan dana	
Realisasi Kumulatif pencairan dana sebelumnya	
Realisasi Kumulatif setelah pencairan ini	
Sisa dana setelah pencairan ini	
Apakah penggunaan dana sesuai jadwal	Ya / Tidak (<i>Harus diisi</i>)
Apakah laporan keuangan sudah diterima	Sudah / Belum / terlambat (<i>Harus diisi</i>)
LEGALITAS (Diisi oleh VCO)	
Apakah Jaminan sudah memenuhi syarat	Sudah / Belum / Kurang
Apakah perjanjian sudah memenuhi syarat	Sudah / Belum / Kurang
PERBANKAN (Diisi oleh Bag. Keuangan)	
Apakah sudah dilakukan joint account	Sudah / Belum
No. Rekening joint account	
Alamat Transfer	
Pemohon VCO	Kadiv. Investasi
Tgl. / Nama terang	Tgl. / Nama terang
Legal Officer	Bag. Keuangan
Tgl. / Nama terang	Tgl. / Nama terang
Direksi	Pemegang Buku Cek No. Cek / BG Stempel (PAID)
Tgl. / Nama terang	Tgl. / Nama terang

LAMPIRAN 9**CALL REPORT**

Tanggal	:	_____
Hari	:	_____
Jam	:	_____
Nama Perusahaan	:	_____
Status	:	_____
Contact Person	:	_____
Alamat	:	_____
Bidang Usaha	:	_____
Lokasi Kunjungan	:	_____
Pihak PMVD	:	1. _____
		2. _____

Catatan Hasil Kunjungan :

Stressing Point !

1. Administration and Filing System
 - a) Legal Document
 - b) Financial Data
 - c) Correspondence
2. Financial Report (Balance Sheet, P&L)
 - a) Ratios
 - i) Liquidity
 - ii) Leverage
 - iii) Activity
 - b) Differences on Balance Sheet
 - c) Inventory Turn Over, "**manipulation !**"
 - d) Account Receivables, "**collection !**"
3. Market
 - a) Omset
 - b) Existing, Captive, & Prospect
4. Labour
 - a) Turn Over
 - b) Payroll
5. Comparison of Projection vs Actual
 - a) Omset
 - b) P&L
 - c) Balance Sheet

Officer-1	Officer-2

LAMPIRAN 10

II. Bobot Penilaian

No.	Faktor yang Dinilai	Bobot
1	Kuantitatif Bagi hasil	
	IRR	20%
	Kolektibilitas Pokok	40%
	Kolektibilitas bagi Hasil	25%
2	Kuantitatif Saham	
	Pencapaian GPM	10%
	Pencapaian OPM	10%
	Pencapaian ROE	10%
	Pencapaian ROA	5%
	Current Ratio	10%
	Debt Service Ratio	10%
	Nilai Saham	10%
	Pencapaian nilai Operational profit dari periode sama tahun sebelumnya	10%
	Pencapaian Net Profit dari periode sama tahun sebelumnya	10%
3	Kualitatif (Bagi Hasil & Saham)	
	Potensi Pertumbuhan	1%
	Pasar	2%
	Persaingan	1%
	Supplier	1%
	Substitusi	1%
	Entry barrier	1%
	Manajemen Perusahaan	2%
	Sumberdaya Manusia	1%
	Sarana & Prasarana	1%
	Hubungan dg PPU dan Pelaporan	2%
	Kelengkapan Dokumen Pembiayaan	1%
	Kecukupan dan Kekuatan agunan	1%

III. Kriteria (Nilai) Kesehatan

Dari hasil pencapaian yang diperoleh atas masing masing parameter, didapatkan nilai pencapaian dan dikalikan dengan bobot dari parameter tersebut, maka didapatkan nilai dari keseluruhan perkiraan tersebut.

Berdasarkan TOTAL nilai keseluruhan dari masing masing parameter tersebut, maka kriteria kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Kriteria Kesehatan	Nilai
1.	Sehat	≥ 80
2.	Dalam Perhatian Khusus	≥ 70 s/d < 80
3.	Kurang Lancar	≥ 50 s/d < 70
4.	Diragukan	≥ 30 s/d < 50
5.	Macet	< 30